



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2034, 2015

KEMENDAGRI. Rencana Kerja. Tahun 2016.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016, mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga Negara menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2016.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

10. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
12. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 978);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renja-KL, adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Renja Kementerian Dalam Negeri, adalah dokumen perencanaan Kementerian Dalam Negeri untuk periode 1 (satu) tahun.

4. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
5. Rencana Kerja Unit Organisasi, yang selanjutnya disebut Renja Unit Organisasi, adalah dokumen perencanaan Unit Organisasi Eselon I/Unit Organisasi Penanggung Jawab Program di lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Satuan Kerja adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program Kementerian Dalam Negeri serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
7. Satuan Kerja Pusat adalah satuan kerja unit organisasi Eselon I/atau unit organisasi penanggung jawab pelaksanaan program yang dibiayai dari DIPA Kementerian Dalam Negeri.
8. Kepala Satuan Kerja Pusat, adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program yang dibiayai dari DIPA Kementerian Dalam Negeri.
9. Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut Satuan Kerja UPT, adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Dalam Negeri penanggungjawab pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DIPA Satuan Kerja.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja di Provinsi yang melaksanakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri, dan Satuan Kerja di Kabupaten/Kota yang melaksanakan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri yang dibiayai dari DIPA Kementerian Dalam Negeri.

11. Program, adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon I atau unit Kementerian/Lembaga yang berisi satu atau beberapa kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator Kinerja yang terukur.
12. Indikator Kinerja Program, yang selanjutnya disebut IKP adalah alat ukur untuk mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program.
13. Kegiatan, adalah merupakan penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon II/Satuan Kerja atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai Keluaran dengan indikator Kinerja yang terukur.
14. Indikator Kinerja Kegiatan, yang selanjutnya disebut IKK, adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan.
15. Target adalah satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja

Pasal 2

Renja-KL Kementerian Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Renja Kementerian Dalam Negeri; dan
- b. Renja Unit Organisasi.

Pasal 3

- (1) Renja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, memuat:
 - a. Arah Kebijakan dan Strategi;
 - b. Program, IKP dan Target IKP;
 - c. Kegiatan, IKK, dan Target IKK; dan
 - d. Alokasi Anggaran Program, Kegiatan dan Target IKK.
- (2) Renja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Satuan Kerja Pusat atas nama Menteri menetapkan Renja Unit Organisasi.
- (2) Renja Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Program, IKP dan Target IKP;
 - b. Kegiatan, IKK dan Target IKK;
 - c. Komponen Input/Sub *Ouput* dan Volume Keluaran;
 - d. Alokasi Anggaran Program, Kegiatan, Target IKK dan Komponen input/Sub *Output*.
- (3) Penetapan Renja Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Renja Kementerian Dalam Negeri dan Renja Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dijabarkan lebih rinci dalam dokumen RKA-KL.
- (2) Renja Kementerian Dalam Negeri dan Renja Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang terdiri dari:
 - a. Satuan Kerja Pusat;
 - b. Satuan Kerja UPT;
 - c. SKPD Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Satuan Kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Pusat Pengembangan SDM Regional;
 - b. Balai Pemerintahan Desa; dan
 - c. IPDN Kampus Daerah.

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dan huruf c, menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Satuan Kerja Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Satuan Kerja Pusat menyampaikan laporan pelaksanaan atas Renja Unit Organisasi kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah atau perubahan RKP atau APBN Tahun 2016, Renja Kementerian Dalam Negeri dapat dilakukan penyesuaian.
- (2) Dalam hal adanya perubahan kebijakan Kementerian, Renja Unit Organisasi dapat dilakukan penyesuaian.
- (3) Penyesuaian Renja Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya target IKP dan IKK dalam Renja Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Kepala Satuan Kerja Pusat melaporkan penyesuaian Renja Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat penyesuaian atas alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dan Pasal 4 ayat (2) huruf d, penyesuaiannya dilakukan melalui revisi RKA-KL dan DIPA.
- (2) Dalam hal terdapat penyesuaian atas komponen input/sub output dan volume keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, penyesuaiannya dilakukan melalui revisi RKA-KL dan DIPA.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016

RENCANA KERJA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016

I. PENDAHULUAN

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, diamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun Renja K/L sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Renstra K/L dan mengacu kepada RKP tahunan.

Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut, untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2016 di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, disusun Renja Tahun 2016 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 dan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016.

A. MANDAT, TUGAS, DAN FUNGSI

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 8 ayat 3, ditegaskan bahwa dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selanjutnya, sebagai pelaksanaan dari UUD 1945, Pasal 17 ayat (3), dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada Pasal 4 dan Pasal 5, bahwa sebagai kementerian yang nomenklaturnya jelas disebutkan dalam UUD 1945, kedudukan Menteri Dalam Negeri adalah pembantu Presiden yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan dalam negeri.

Penjabaran lebih lanjut atas rincian tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri tersebut diatas, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, ditegaskan bahwa Tugas Kementerian Dalam Negeri adalah menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa,

pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian dalam negeri.
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian dalam negeri.
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian dalam negeri.
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian dalam negeri di daerah.
6. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.
8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri.
9. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
10. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk menjalankan fungsi diatas, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh 11 (sebelas) Unit Kerja Eselon I, yaitu: (1) Sekretariat Jenderal; (2) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum; (3) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan; (4) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; (5) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah; (6) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa; (7) Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah; (8) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (9) Inspektorat Jenderal; (10) Badan Penelitian dan Pengembangan; (11) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta 5 (lima) Staf Ahli, masing-masing: (1) Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa; (2) Bidang Pemerintahan; (3) Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga; (4) Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan (5) Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.

Adapun pokok-pokok cakupan Tugas Kementerian Dalam Negeri yang melekat pada Unit-Unit Kerja Eselon I diatas meliputi:

1. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
2. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum; bidang pembinaan administrasi kewilayahan; bidang penyelenggaraan otonomi daerah; bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah; bidang

pembinaan pemerintahan desa; bidang pembinaan keuangan daerah; serta bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

3. Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.
5. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri.

Sedangkan pokok-pokok cakupan Fungsi Kementerian Dalam Negeri yang melekat pada Unit-Unit Kerja Eselon I diatas meliputi:

1. Koordinasi, penyusunan, pembinaan dan penyelenggaraan tugas, serta pemberian dukungan administrasi (mencakup rencana dan program; ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi; organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; peningkatan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan, harmonisasi, advokasi, konsultasi, pendapat hukum dan bantuan hukum; serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa) lingkup Kementerian Dalam Negeri, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri.
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang politik dan pemerintahan umum; bidang pembinaan administrasi kewilayahan; bidang penyelenggaraan otonomi daerah; bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah; bidang pembinaan pemerintahan desa; bidang pembinaan keuangan daerah; serta bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, kelembagaan desa, dan kerja sama desa; bidang pembinaan keuangan daerah; bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, nik dan KTP-el, sumber daya manusia pelaksana administrasi kependudukan.
4. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan kementerian dalam negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah; pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern di lingkungan kementerian dalam negeri terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan

lainnya; serta koordinasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. Penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran, pelaksanaan pengkajian kebijakan, serta pelaksanaan dan pengendalian penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.
6. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, serta pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri, penilaian kompetensi sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri, serta pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan jabatan fungsional bidang pemerintahan dalam negeri.

Di samping itu, dalam hal pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintahan dalam negeri, Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi penyediaan aparatur pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang profesional dan berwawasan nasional. Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1992 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pemerintah Dalam Negeri, dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan, bahwa di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dibentuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Berpedoman pada ketentuan tersebut diatas, ruang lingkup tugas dan fungsi dari IPDN yaitu menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang kepomongprajaan melalui sistem pendidikan tinggi kepomongprajaan untuk menghasilkan lulusan sebagai abdi negara dengan karakteristik khusus, yang dilakukan dengan menerapkan kombinasi antara pengajaran, pengasuhan, dan pelatihan. Pendidikan tinggi kepomongprajaan dimaksud meliputi Program Vokasi (D-IV), Program Akademik (S-1, S-2, dan S-3), serta Program Profesi Kepomongprajaan.

B. ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015-2019

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah dirancang dalam RPJPN 2005-2025, periode pembangunan 2015-2019 merupakan masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 di tahun 2020-2025. Untuk itu, Pemerintah telah menyusun RPJMN 2015-2019 dengan mengangkat Visi:

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.

Untuk mencapai Visi tersebut, Pemerintah telah menetapkan Misi, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritime.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi diatas telah dirumuskan 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan Nasional atau Nawa Cita, meliputi:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pencapaian Agenda Prioritas Pembangunan Nasional sesuai RPJMN 2015-2019, sebagaimana tertuang dalam Renstra Kemendagri 2015-2019 telah ditetapkan visi dan misi pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri, yaitu:

“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Kementerian Dalam Negeri, meliputi:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, Undang-UndangD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Dalam rangka mendukung Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), serta pencapaian Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi sebagai berikut:

1. Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, melalui strategi:
 - a. Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik.
 - b. Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan.
 - c. Peningkatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan.
 - d. Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
 - e. Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan gangguan keamanan dalam negeri.

2. Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan, melalui strategi:
 - a. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan;
 - b. Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - c. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi.
 - d. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar.
 - e. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui strategi:
 - a. Percepatan penerbitan regulasi dan kebijakan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah.
 - c. Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas Pimpinan dan aparatur secara efektif dan proporsional dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - d. Peningkatan kemampuan dan prakarsa pemerintahan daerah terhadap pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
 - e. Peningkatan kinerja pemerintahan daerah otonom baru.
 - f. Peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan otsus/keistimewaan daerah.
 - g. Harmonisasi dan penataan Produk Hukum Daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif, melalui strategi:
 - a. Mendorong penetapan Perda tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu.
 - b. Mendorong penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu.
 - c. Mendorong Peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD.
 - d. Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di Daerah.
 - e. Peningkatan kualitas belanja pada APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, terutama untuk pembangunan

- infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan.
- f. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang Milik Daerah (BMD).
 - g. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah.
5. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, melalui strategi:
 - a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
 - b. Mendorong harmonisasi, keselarasan, dan sinergitas pembangunan antar Daerah serta antara Pusat dan Daerah.
 - c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
 6. Mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah, melalui strategi:
 - a. Percepatan penyelesaian dan fasilitasi penyusunan regulasi terkait SPM.
 - b. Penerapan indikator utama SPM di daerah.
 - c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mencakup 6 (enam) urusan wajib dasar, 18 urusan wajib non dasar, dan 8 (delapan) urusan pilihan.
 - d. Penyelesaian perselisihan antar daerah terkait dengan urusan pemerintahan.
 7. Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah, melalui strategi:
 - a. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah.
 - b. Penguatan kelembagaan PTSP di Daerah.
 - c. Peningkatan kualitas dan cakupan daerah yang menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
 - d. Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM.
 8. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui strategi:
 - a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Peningkatan akuntabilitas, efektifitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa.

- c. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa.
 - d. Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa.
 - e. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa.
9. Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan *database* kependudukan nasional, melalui strategi:
- a. Penyediaan *database* kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Pemanfaatan NIK, *database* kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak.
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan.
 - d. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
10. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui strategi:
- a. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan.
 - b. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur.
 - c. Penyediaan sistem informasi yang terintegrasi.
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - e. Peningkatan kualitas kelitbangan dalam perumusan kebijakan.
 - f. Peningkatan kualitas pendidikan dan alumni IPDN.

II. POKOK-POKOK CAPAIAN TAHUN 2015

Sebagai gambaran kondisi umum pada awal pelaksanaan Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016, diuraikan pokok-pokok capaian Tahun 2015 yang dikelompokkan masing-masing ke dalam Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, sebagai berikut:

1. Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, dengan pokok-pokok capaian kinerja tahun 2015 antara lain:
 - a. Terselenggaranya kemitraan dengan 260 Ormas dalam rangka pendidikan politik dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, peningkatan kapasitas kelompok perempuan, penyandang difabel dan kelompok rentan/marjinal lain.
 - b. Terfasilitasinya Kelompok Kerja (Pokja) Demokrasi di 34 Provinsi.
 - c. Terlaksananya Forum Dialog Kewaspadaan Nasional melalui Rakornas Penanganan Konflik Sosial melibatkan K/L terkait; Forum Komunikasi dan Koordinasi Nasional Penanganan Faham Radikal melibatkan berbagai elemen masyarakat; serta Penguatan dan

- pemberdayaan forum dialog kemasyarakatan di daerah (FPK, FKDM, FKUB dan PPWK).
- d. Terlaksananya Rapat Koordinasi Nasional dalam rangka antisipasi kesiapan dan dukungan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015.
 - e. Penguatan dan peningkatan kapasitas Intelijen Daerah dalam rangka pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini.
 - f. Penandatanganan MoU Kerjasama Kemendagri dengan ormas nasional antara lain: LVRI, DHN45, KNPI, NU, Muhammadiyah, PKK, GOPTKI dalam rangka penguatan ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
 - g. Penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan melalui beberapa forum wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di 7 provinsi, antara lain: fasilitasi peningkatan kesadaran bela Negara melalui pagelaran kreativitas pemuda, forum bagi mahasiswa dan pelajar, sosialisasi bagi perempuan, sosialisasi galang kekuatan bangsa dalam konteks bela Negara bagi tokoh masyarakat adat dan agama, penguatan PPWK, serta desiminasi karakter bangsa.
 - h. Meningkatkan kemampuan kader pelatih pembauran dan kader pelatih penguatan nilai-nilai sejarah kebangsaan sebagai agen perubahan dalam rangka penguatan karakter bangsa melalui pelatihan bagi 240 orang aparatur dan anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di 34 provinsi dan perwakilan Kabupaten/Kota terpilih.
 - i. Terselenggaranya pendidikan wawasan kebangsaan terkait nilai-nilai dasar karakter bangsa dengan sasaran pemuda, perempuan dan aparat pemerintahan melalui forum dialog/komunikasi lintas generasi dalam rangka revitalisasi nilai-nilai sejarah kebangsaan di Maluku Utara, Fasilitasi masyarakatan pancasila di Universitas Pendidikan Indonesia-Bandung, Universitas Nusa Cendana-Kupang, Forum Pencegahan Ideologi lain terhadap nilai-nilai Ideologi Pancasila di NTT, Forum Fasilitasi Daerah dalam penguatan ketahanan ideologi di Bengkulu, dan aktualisasi nilai-nilai pancasila bagi komunitas masyarakat berbasis keagamaan.
 - j. Terlaksananya pengawasan birokrasi pemerintahan daerah dalam Pilkada.
2. Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan, dengan pokok-pokok capaian kinerja tahun 2015 antara lain:
 - a. Terfasilitasinya kerjasama perbatasan antar negara (JIM, SOSEK MALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG) di 6 (enam) Provinsi dan fasilitasi penyiapan 5 (lima) kesepakatan penyelesaian batas dan hubungan antar negara yang berbatasan, sesuai jadwal dengan Pemerintah Malaysia, RDTL dan PNG.
 - b. Terfasilitasinya pembangunan sarpras pemerintahan di wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau kecil terluar di 20 daerah (dalam proses pengerjaan).

- c. Meningkatkan kapasitas aparat Satpol PP dan penanggulangan bencana Kabupaten/Kota melalui:
 - 1) Bimtek Peran Satlinmas dalam penanggulangan bencana di Provinsi Kalteng dan Kota Batam.
 - 2) Pelatihan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran bagi 450 orang di 7 (tujuh) Provinsi: Kaltara, Kalteng, Gorontalo, Bali, Sultra, Sulteng, dan Kepri.
 - 3) Pembangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di 30 Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran.
 - d. Telah ditetapkan 42 segmen batas antar daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota dengan 39 Permendagri.
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, dengan pokok-pokok capaian kinerja tahun 2015 antara lain:
- a. Terfasilitasinya administrasi pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota pada daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2015.
 - b. Terfasilitasinya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 269 daerah, yang terdiri 9 (sembilan) Provinsi dan 260 Kabupaten/Kota (April: konsolidasi lintas instansi, Mei-Juni: sosialisasi peraturan, Desember: Pelaksanaan). Fasilitasi untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Pilkada sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, antara lain:
 - 1) Fasilitasi bersama Komisi II DPR RI memberikan masukan kepada KPU RI dan Bawaslu RI dalam menyusun peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
 - 2) Penyusunan Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 51 Tahun 2015 sebagai payung hukum pengalokasian anggaran dalam APBD untuk penyelenggaraan Pilkada di daerah.
 - 3) Menyelenggarakan Rakor Camat dalam rangka mendukung Pilkada serentak di Batam (Kabupaten/Kota peserta pilkada).
 - 4) Menerbitkan beberapa surat edaran antara lain:
 - a) Dukungan Pegawai Negeri Sipil daerah pada Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
 - b) Penegasan netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pilkada.
 - c) Dukungan aparat Satpol PP dalam penertiban alat peraga saat sosialisasi calon/pasangan calon maupun sesudah kampanye.
 - d) Mengoptimalkan keberadaan *Desk* Pilkada dalam memantau penyelenggaraan pilkada sekaligus sebagai media koordinasi dan konsolidasi seluruh *stakeholder* dalam mengawal serta menunjang kelancaran penyelenggaraan Pilkada.

- c. Percepatan penyelesaian penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda melalui Posko Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk memantau progres dan memfasilitasi percepatan penyelesaian penyusunan peraturan pelaksanaan UU dimaksud.
- d. Terevaluasinya 18 Daerah Otonom Baru (DOB) yang dibentuk kurang dari 5 (lima) tahun, dengan hasil terdapat 20% peningkatan kinerja.
- e. Terevaluasinya DOB yang berusia 0 (nol) s/d 3 (tiga) tahun maupun yang bersifat lanjutan untuk DOB berusia 4 (empat) s/d 5 (lima) tahun, terhadap 10 aspek perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan, dengan hasil pada 15 DOB berusia 0 (nol) s/d 3 (tiga) tahun dan 57 DOB berusia 3 (tiga) s/d 5 (lima) tahun, secara umum menunjukkan adanya kemajuan dan peningkatan (termasuk pengisian KDH definitif pada 15 DOB akan dilakukan melalui Pilkada Serentak 2015).
- f. Terbina dan terfasilitasinya pelaksanaan Otsus, antara lain:
 - 1) Pelantikan 11 anggota DPR Papua Barat pada tanggal 21 Januari 2015.
 - 2) Kerjasama peningkatan kualitas sumberdaya manusia Orang Asli Papua dengan sinkronisasi dan sinergitas program antar KL, melalui Nota Kesepahaman 3 (tiga) Menteri yaitu Mendagri, Mendikbud, dan Menristekdikti, tentang Dukungan Pelaksanaan Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK).
 - 3) Mendorong K/L dan Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat melaksanakan penguatan kelembagaan dalam rangka implementasi Otsus Papua, serta evaluasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.
 - 4) Mendorong K/L terus melakukan *affirmative action* dan terobosan dalam pelaksanaan pembangunan di Papua, serta pembinaan, pendampingan, dan pengawasan implementasi Otsus Papua.
- g. Terfasilitasinya tindak lanjut usulan pembentukan DOB yang telah dikonsultasikan pada Rapat terbatas, RDP bersama DPR RI, dan Raker DPD RI.
- h. Terevaluasinya Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Tahun 2014 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2013 dengan hasil 3 Provinsi, 10 Kabupaten dan 10 Kota berprestasi kinerja terbaik secara nasional dan mendapat penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, serta pemberian penghargaan Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota yang 3 (tiga) tahun berturut-turut berprestasi kinerja terbaik, pada tanggal 25 April 2015.

4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif, dengan pokok-pokok capaian kinerja tahun 2015 antara lain:
 - a. Terlaksananya penandatanganan kerjasama (MoU) Menteri Dalam Negeri dengan Kepala Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) mengenai Kerjasama dalam rangka meningkatkan Peran BPD dalam Pembangunan Daerah.
 - b. Terlaksananya evaluasi 32 Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi TA.2014; 10 Ranperda Perubahan APBD Provinsi TA.2015; 12 Ranperda Provinsi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), serta Pelaksanaan konsultasi terkait evaluasi Ranperda Kabupaten/Kota mengenai (PDRD).
 - c. Terealisasinya belanja APBD per 20 Oktober 2015, untuk APBD Provinsi rata-rata 54,0% dan APBD Kabupaten/Kota rata-rata 49,97%.
 - d. Terlaksananya penetapan Perda APBD tepat waktu meningkat di tahun 2015, untuk Provinsi 94,12% (2014 sebesar 74,41%); Kabupaten 84,58% (2014 sebesar 64,56%); Kota 87,10% (2014 sebesar 66,67%).
 - e. Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemda di tahun 2015, yaitu opini WTP untuk 235 Pemda (2014 sebanyak 153 Pemda).
 - f. Terfasilitasinya 50 Kabupaten/Kota dalam peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan, infrastruktur, dan daya saing perekonomian daerah.
 - g. Terfasilitasinya pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bersama Bank Indonesia dengan tujuan memantau harga kebutuhan pokok yang mempengaruhi inflasi daerah. Sampai saat ini, TPID telah terbentuk di 34 Provinsi, 320 Kabupaten, dan 85 Kota.
5. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, dengan pokok-pokok capaian kinerja tahun 2015 antara lain:
 - a. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui koordinasi pimpinan daerah dengan tema "Percepatan Penyerapan Anggaran, Pemekaran Daerah, Pilkada Serentak, dan Konsolidasi Kesbangpol 2015".
 - b. Terlaksananya fasilitasi penetapan Perda RTRW pada 2 (dua) Provinsi (Kalbar dan Kalteng) dari sisa 9 (sembilan) Provinsi yang belum menetapkan Perda RTRW.
 - c. Terfasilitasinya Musrenbangda di 34 Provinsi (April sd Mei) dan Peningkatan kualitas koordinasi kelembagaan penataan ruang melalui Rakernas BKPRN yang difasilitasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Rakornas BKPRD yang difasilitasi Kemendagri.
 - d. Tersusunnya kebijakan sebagai input regulasi tentang Inovasi Daerah (RPP).

- e. Telah dilakukannya pengkajian dan evaluasi perda bermasalah dan telah diterbitkan 1 Keputusan Mendagri tentang Pembatalan Perda.
6. Mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah, dengan pokok-pokok capaian kinerja tahun 2015 antara lain:
 - a. Tersusunnya dokumen baseline penerapan 6 (enam) SPM pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu.
 - b. Terlaksananya koordinasi dan kesepakatan dengan BKPM Provinsi Jatim dalam rangka pilot projek pelayanan investasi sesuai formula kebijakan BKPM tentang SPM Penanaman Modal.
 - c. Terharmonisasinya peraturan perizinan Pusat-Daerah dengan provinsi NTT tanggal 7 Oktober 2015, yaitu antara peraturan perizinan terkait Gangguan dengan Izin Lingkungan dan IMB dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2010 dan Permen PU Nomor 24 Tahun 2007.
7. Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah, dengan pokok-pokok capaian kinerja tahun 2015 antara lain:
 - a. Telah diterapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di 37 Kabupaten/Kota pada 13 Provinsi.
 - b. Terbentuknya PTSP di 34 Provinsi. Hingga saat ini sedang disusun instrumen evaluasi penerapan PTSP yang Prima, disamping itu sedang dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 34 provinsi terkait Kelembagaan PTSP Provinsi, pelimpahan kewenangan dan pengaduan.
8. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, dengan pokok-pokok capaian kinerja tahun 2015 antara lain:
 - a. Terlaksananya konsolidasi dan penyamaan persepsi dengan Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota melalui Rakornas Program Bina Pemerintahan Desa Tahun 2015.
 - b. Tersusunnya Modul Pelatihan Master of Trainer (MoT), Trainer of Trainee (ToT), Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa, dengan materi pokok meliputi manajemen pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, dan penyusunan produk hukum desa. Modul telah diujicoba di Lampung, Yogyakarta, dan Makassar.
 - c. Terlaksananya pelatihan MoT bagi 317 Aparatur Pusat dan Pemda Provinsi, utk menyiapkan Pelatih ToT dan supervisor pelaksanaan pelatihan di setiap Provinsi.
 - d. Terlaksananya pelatihan Trainer of Trainee (ToT) bagi 2.165 Aparatur Pemda Kabupaten/Kota di Jakarta, dengan tujuan mempersiapkan Pelatih Aparatur Kecamatan dan Pemerintah Desa, serta Supervisor implementasi hasil pelatihan di lapangan.
 - e. Terlaksananya pelatihan Aparatur Kecamatan dan Desa secara bertahap melibatkan Kasi Pemerintahan dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dengan target 14.100 orang; serta pelatihan

bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa dengan target 222.279 orang.

- f. Terlaksananya pembinaan, monitoring dan supervisi terkait Dana Desa, melalui:
 - 1) Surat Mendagri kepada Gubernur/Bupati/Walikota 10 Juli 2015 perihal Penyampaian Data Dana Desa yang disalurkan ke Desa.
 - 2) Keputusan Bersama Mendagri, Menkeu, dan Mendes PDTT tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, atas inisiasi Kemendagri.
 - 3) Petunjuk kepada Bupati/Walikota mengenai: langkah-langkah penyaluran Dana Desa dan melakukan fasilitasi secara langsung kepada Desa; monitoring penyaluran Dana Desa tahap I dan II; percepatan pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur pedesaan secara padat karya dengan mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja lokal.
 - 4) Pemantauan percepatan penyaluran Dana Desa dengan menerjunkan Aparat Kemendagri keseluruhan Provinsi.
 - g. Terbentuknya *help desk* bersama akuntabilitas keuangan desa.
9. Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan *database* kependudukan nasional, dengan pokok-pokok capaian kinerja tahun 2015 antara lain:
- a. Telah beroperasinya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di 508 Kabupaten/Kota.
 - b. Telah terekamnya 154.822.166 penduduk (per 3 Desember 2015) dari 187.785.383 penduduk wajib KTP-el.
 - c. Terlaksananya pre-personalisasi blanko KTP-el sebanyak 18,9 Juta keping dan telah tercetak sebanyak 10.040.705 KTP-el (per 3 Desember 2015).
 - d. Termanfaatkannya database kependudukan untuk pelayanan publik oleh 21 Kementerian/Lembaga/Instansi terkait lainnya, yaitu: PT. BCA, PT. BNI, BNP2TKI, PT. BRI, PT. JASA RAHARJA, KEMENKES, KPK, PAJAK, Korlantas POLRI, PPAK, KEMENPAN, BPN, PT. MANDIRI, BKN, BNN, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, TNP2K, KOMINFO, Pegadaian, dan KPU.
 - e. Terselenggaranya administrasi kependudukan melalui kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan telah dilaksanakan oleh 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota.
 - f. Tersedianya DAK2 dan DP4 untuk mendukung Pilkada Serentak 2015 yang bersumber dari Data Kependudukan Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK *online*) dan diintegrasikan dengan hasil perekaman sidik jari dan iris mata.
10. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan pokok-pokok capaian kinerja tahun 2015 antara lain:

- a. Terlaksananya kampanye nasional revolusi mental dan restorasi sosial dalam proses persiapan seiring dengan penyelesaian Inpres tentang Revolusi Mental dan Surat Edaran tentang Restorasi Sosial.
- b. Peningkatan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dibandingkan hasil penilaian Tahun 2015 berdasarkan Hasil Evaluasi oleh Tim Evaluasi RB dari KemenPAN-RB.
- c. Telah berjalannya operasionalisasi 22 jenis layanan melalui Unit Layanan Administrasi (ULA). Jumlah layanan masuk sebanyak 6.411, dengan progres selesai 6.156 dan masih dalam proses 255 permohonan layanan.
- d. Terlaksananya *assesment* terhadap 18 peserta seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kemendagri.
- e. Terlaksananya penanganan 507 pengaduan/aspirasi melalui Sarana Pengaduan dan Aspirasi (SaPA), dengan perkembangan 438 pengaduan telah ditindaklanjuti dan 69 pengaduan lainnya masih dalam proses.
- f. Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan dengan hasil opini WTP terhadap Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2014.
- g. Terlaksananya penerapan dan sosialisasi langkah-langkah budaya anti korupsi dan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Kemendagri.
- h. Terbangunnya Zona Integritas di Lingkungan Kemendagri.
- i. Terlaksananya pengawasan akuntabilitas keuangan dan kinerja Kemendagri.
- j. Terlaksananya wisuda program D-IV, S-1, S-2 dan S-3 oleh Mendagri terhadap 1.984 lulusan IPDN pada tanggal 14 Juni 2015.
- k. Terlaksananya pengukuhan 1.586 alumni IPDN sebagai Pamong Praja Muda oleh Presiden RI tanggal 15 Juni 2015.
- l. Terlaksananya pencanangan IPDN sebagai Pusat Pengembangan Revolusi Mental di lingkungan pemerintahan dalam negeri oleh Presiden RI pada tanggal 15 Juni 2015.
- m. Terselenggaranya kerjasama dengan Tim Nasional Revolusi Mental Kantor Menko PMK, dalam rangka pelatihan revolusi mental bagi praja dan *civitas* akademik IPDN.
- n. Tersusunnya kurikulum perkuliahan dan pelatihan revolusi mental bagi Muda, Madya, Nindya dan Wasana Praja sebagai Praja Pelopor Revolusi Mental (PPRM).
- o. Terlaksananya ToT revolusi mental bagi dosen, pelatih dan pengasuh serta *civitas* akademika IPDN; Pelatihan alumni IPDN sebagai Kader Pelopor Revolusi Mental (KPRM); dan Pelatihan KPRM bagi mahasiswa program profesi kepamongprajaan, program S-2 dan S-3 IPDN.
- p. Terlaksananya pelatihan dan pengukuhan Kader Pelopor Revolusi Mental (KPRM) bagi 1.586 Pamong Praja Muda.

- q. Terlaksananya seleksi calon praja IPDN Tahun Akademik 2015-2016 dengan melibatkan: KPK terkait materi seleksi integritas dan kejujuran; Kemen PAN dan RB terkait formasi CPNS bagi calon praja; BKN terkait materi seleksi Tes Kompetensi Dasar; Dinas Psikologi TNI AD terkait Tes Psikologi; dan Pusat Kesehatan Mabes TNI utk Tes Kesehatan.

III. RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016

A. POKOK-POKOK KEBIJAKAN RENJA KEMENDAGRI TAHUN 2016

Dalam rangka operasionalisasi Arah Kebijakan dan Strategi Kemendagri pada tahun 2016, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016, disusun Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran yang memuat di dalamnya dukungan Kemendagri atas pelaksanaan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), Program Quick Wins, dan Prioritas K/L.

Terkait pelaksanaan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) pada Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016, terdiri dari:

1. Nawa Cita 1 *"menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara"*, dengan Agenda Prioritas:
 - a. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran, dengan target 77%.
 - b. Jumlah K/L yang dapat mengakses database kependudukan berbasis NIK Nasional dan atau digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen, informasi untuk pelayanan publik, dengan target 25 K/L (kumulatif).
 - c. Penerbitan KTP-el pada 514 Kabupaten/Kota, target 4 (empat) juta keping.
 - d. Jumlah Kabupaten/Kota yang telah terpenuhi jaringan komunikasi, serta sarana dan prasarana SIAK di Daerah maupun Data Center Kependudukan secara Online, dengan target 514 Kabupaten/Kota.
 - e. Fasilitasi Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk di Daerah melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dengan target 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota.
 - f. Penyusunan pedoman/instrumen pengukuran kinerja Ormas, dengan target 1 (satu) dokumen.
 - g. Jumlah ormas yang bermitra untuk peningkatan kapasitas kelompok perempuan, penyandang difabel dan kelompok rentan/marginal lain melalui kemitraan dengan ormas, dengan target 100 Ormas.
 - h. Penguatan Pokja Demokrasi, dengan target 34 Provinsi.
 - i. Penguatan dan pemberdayaan forum dialog kewaspadaan nasional (penanganan konflik sosial), dengan target 34 Provinsi.

2. Nawa Cita 2 "*membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya*", dengan Agenda Prioritas:
 - a. Penyediaan layanan *teleconference* Pusat dan Daerah.
 - b. E-procurement pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemendagri.
 - c. Operasionalisasi 22 jenis layanan melalui Unit Layanan Administrasi.
 - d. Penilaian kinerja PNS melalui SIKERJA.
 - e. Penyelesaian 60 Prolegdagri.
 - f. Pencapaian Indeks Akuntabilitas Keuangan, dengan nilai B (75).
 - g. Pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga dan Lembaga Kependidikan serta Teknologi Pembelajaran, dengan target 44 angkatan.
 - h. Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota dan DPRD meningkatkan kapasitasnya dalam Manajemen dan Kepemimpinan Pemda, dengan target 16 angkatan.
 - i. Aparat Kemendagri dan Pemda meningkatkan kapasitasnya dalam Bidang Kesbangpol, Pemerintahan daerah dan Otonomi daerah, dengan target 37 angkatan.
 - j. Aparat Kemendagri dan Pemda meningkatkan kapasitasnya dalam Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah, dengan target 67 angkatan.
 - k. Aparat Kemendagri dan Pemda meningkatkan kapasitasnya dalam Bidang Kepamongprajaan, Prajabatan dan Kepemimpinan, dan Administrasi Kesekretariatan dan Pengawasan, dengan target 42 angkatan.
 - l. Aparat Kemendagri dan Pemda meningkatkan kapasitasnya dalam Bidang Pengembangan Kompetensi Jafung Kemendagri, Teknis dan Fungsional K/L, dengan target 34 angkatan.
 - m. Aparat Kemendagri dan Pemda meningkatkan kapasitasnya dalam Teknis Pemerintahan Daerah dengan target 117 angkatan.
 - n. Aparat Kemendagri dan Pemda meningkatkan kapasitasnya dalam Fungsional Pemerintahan Daerah dan Struktural, dengan target 51 angkatan.
3. Nawa Cita 3 "*membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan*", dengan Agenda Prioritas:
 - a. Jumlah Daerah Otonom Baru yang meningkat kinerja pemerintahannya, dengan target 40%.
 - b. Fasilitasi peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah otonomi khusus/daerah istimewa, dengan target 5 daerah.

- c. Evaluasi dan verifikasi rencana/usulan pembentukan DOB dan implementasi kebijakan penataan daerah, dengan target 54 dokumen.
- d. Fasilitasi pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), dengan target 85% daerah provinsi berkinerja tinggi berdasarkan EKPPD.
- e. Pembatalan Perda dan Perkada yang bermasalah dengan target 100%.
- f. Rancangan Perda yang dievaluasi dan/atau dikonsultasikan (RPJMD, RTRW, APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah), dengan target 350 Rancangan Perda.
- g. Provinsi/Kabupaten/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang tepat waktu, dengan target 30 Provinsi dan 250 Kabupaten/Kota.
- h. Peningkatan persentase penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD, dengan target 62%.
- i. Provinsi/Kabupaten/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu, dengan target 30 Provinsi dan 250 Kabupaten/Kota.
- j. Pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual, dengan target 22 Provinsi dan 275 Kabupaten/Kota.
- k. Daerah yang mendapatkan opini WTP (Provinsi dan Kabupaten/Kota), dengan target 21 Provinsi dan 200 Kabupaten/Kota.
- l. Daerah yang belanja APBDnya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan, dengan target 15% daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).
- m. Fasilitasi penerapan Permendagri tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), dengan target 80 Kabupaten/Kota di 6 Provinsi.
- n. Provinsi yang melaksanakan kerjasama perbatasan antar negara (JIM, SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG), dengan target 6 Provinsi.
- o. Kesepakatan batas antar negara dalam rangka penyelesaian batas dan hubungan antar negara yang berbatas, dengan target 5 (lima) kesepakatan.
- p. Pembangunan sarpras yang dialokasikan bagi daerah perbatasan antar negara dan pulau-pulau kecil terluar dalam rangka pelayanan umum, dengan target 21 unit sarpras.
- q. Peningkatan kapasitas aparaturnya daerah dalam penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, dengan target 10 daerah (50 orang per daerah).
- r. Fasilitasi penyelenggaraan Musrenbangda Provinsi dan regional, dengan target 34 Provinsi.

- s. Penyediaan Peta Perkotaan dan Kawasan Perkotaan yang terpadu skala 1:1000 dengan target 5 (lima) kawasan perkotaan metropolitan, 5 (lima) kota sedang.
 - t. Penyelenggaraan Rakornas BKPRD dalam rangka meningkatkan kualitas koordinasi kelembagaan penataan ruang.
 - u. Fasilitasi dan koordinasi pemenuhan SPM pelayanan dasar untuk masyarakat kurang mampu, dengan target 10 Kabupaten.
4. Nawa Cita 6 "*meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya*", dengan Agenda Prioritas:
- a. Provinsi yang memiliki PTSP yang Prima (jenis perijinan yang dilimpahkan ke PTSP, penyederhanan perijinan, kecepatan pelayanan, kualitas pelayanan), dengan target 51 Provinsi.
 - b. Terfasilitasinya daerah dalam peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan, infrastruktur ekonomi dan daya saing perekonomian daerah (khususnya fasilitasi PTSP), dengan target 10 Provinsi, 120 Kabupaten/Kota.
5. Nawa Cita 8 "*melakukan revolusi karakter bangsa*", dengan Agenda Prioritas:
- a. Daerah melaksanakan penguatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, dengan target 34 Provinsi.
 - b. Kader pelatih pembauran dan kader pelatih penguatan nilai-nilai sejarah kebangsaan sebagai agen perubahan dalam rangka penguatan karakter bangsa, dengan target 7 (tujuh) angkatan.
 - c. Penguatan lulusan IPDN sebagai Pamong Praja Muda dan sekaligus Kader Pelopor Revolusi Mental di daerah.
 - d. Seleksi calon praja IPDN Tahun Akademik 2015-2016 dengan melibatkan: KPK terkait materi seleksi integritas dan kejujuran; Kemen PAN dan RB terkait formasi CPNS bagi calon praja; BKN terkait materi seleksi Tes Kompetensi Dasar; Dinas Psikologi TNI AD terkait Tes Psikologi; dan Pusat Kesehatan Mabes TNI utk Tes Kesehatan.
6. Nawa Cita 9 "*memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia*", dengan Agenda Prioritas:
- a. Provinsi memiliki PTSP yang prima, dengan target 51 Provinsi.
 - b. Fasilitasi kampanye Nasional terkait revolusi mental dan restorasi sosial dengan target 34 Provinsi, dan 34 K/L.

Terkait dengan target Quick Wins RKP Tahun 2016 yang menjadi penugasan kepada Kementerian Dalam Negeri, meliputi:

1. Penyediaan fasilitas rapat koordinasi pusat dan daerah secara reguler melalui jaringan *teleconference*, dengan target 10 bulan layanan.

2. Kampanye Nasional terkait revolusi mental dan restorasi sosial, dengan target sebanyak 34 Provinsi, 34 K/L, dan 27 LPNK.
3. Fasilitasi pemantapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik di Papua dan Papua Barat, dengan target 2 (dua) Perdasi dan Perdasus di Papua dan Papua Barat.
4. Penyusunan NSPK penguatan kelembagaan badan percepatan pembangunan kawasan Papua dan Papua Barat, dengan target 2 (dua) NSPK.
5. Operasionalisasi pelayanan umum melalui PTSP, dengan target pelaksanaan *pilot project* di 10 Kabupaten/Kota pada 5 (lima) Provinsi (Jatim, Sumbar, Sultra, Kalteng, NTB).
6. Fasilitasi penerapan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat di luar jam kantor desa, dengan target 1.000 Desa.
7. *Pilot Project* pelayanan Mobile Terpadu (Imigrasi, Perijinan Hak Cipta-Paten, kependudukan dan catatan sipil), dengan target 1 (satu) laporan pelaksanaan.
8. Penyusunan dokumen panduan penerapan *e-budgeting*, dan pelaksanaan *pilot project* penerapannya di Jawa Barat dan NTT.

Selanjutnya, terkait target Agenda Prioritas dan Quick Wins tersebut diatas, diuraikan lebih lanjut sekaligus sebagai Prioritas Kementerian Dalam Negeri, dalam Matriks Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2016 pada 12 Program, yang terdiri dari:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri;
2. Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
3. Program Bina Administrasi Kewilayahan;
4. Program Bina Otonomi Daerah;
5. Program Bina Pembangunan Daerah;
6. Program Bina Pemerintahan Desa;
7. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah;
8. Program Penataan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
9. Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri;
11. Program Pengembangan SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri; dan
12. Program Pendidikan Kepamongprajaan.

B. Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan Alokasi Anggaran Tahun 2016

1. Pagu Indikatif

Berdasarkan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas No.082/M.PPN/04/2015 dan Menteri Keuangan No.S-288/MK.02/2015, tanggal 15 April 2015 perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, ditetapkan Pagu Indikatif Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016 sebesar Rp.5.983.127.053.000,-. Pagu Indikatif Tahun 2016 tersebut mengalami penurunan sebesar 2,27% bila dibandingkan dengan Alokasi Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.6.122.360.547.000,-.

2. Pagu Anggaran

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No.S-505/MK.02/2015 tanggal 7 Juli 2015 perihal Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2016, ditetapkan perubahan Pagu Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016 dari semula dalam Pagu Indikatif sebesar Rp.5.983.127.053.000,- menjadi sebesar Rp.4.968.104.645.000,- dalam Pagu Anggaran (penurunan pagu sebesar Rp.1.015.022.408.000,- atau 16,96%).

3. Alokasi Anggaran

Selanjutnya, berdasarkan Surat Menteri Keuangan No.S-868/MK.02/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016, Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp.5.124.503.315.000,-, atau mengalami penyesuaian dari Pagu Anggaran yang semula sebesar Rp.4.968.104.645.000,-. Penyesuaian tersebut berupa:

a. Penundaan Belanja sebesar Rp.203.601.330.000,-

Berkenaan dengan Penundaan Belanja Kementerian Dalam Negeri dalam Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2016 sesuai Surat Menteri Keuangan tersebut diatas, dilakukan optimalisasi pagu yang seluruhnya bersumber dari Program Bina Pemerintahan Desa. Berdasarkan kriteria kebijakan penundaan belanja K/L dalam APBN TA.2016 yang disampaikan Kementerian Keuangan pada rapat koordinasi tanggal 9 Oktober 2015, penundaan dilakukan pada target-target kinerja yang pelaksanaannya dapat ditunda/baru dimulai pada Triwulan II Tahun 2016.

Penundaan tersebut dilakukan pada belanja barang non operasional kantor pusat berupa penundaan kegiatan monitoring dan evaluasi, bimtek, sosialisasi peraturan perundangan, penyusunan NSPK, yang pelaksanaannya baru di mulai pada Triwulan II Tahun 2016. Selain itu penundaan dilakukan pula pada belanja non operasional Satker Daerah (Dana Dekonsentrasi) berupa penundaan jumlah angkatan pelatihan pengembangan kapasitas aparatur desa.

b. Tambahan Belanja Prioritas sebesar Rp.360.000.000.000,-

Selanjutnya, berkenaan dengan ditetapkannya Pagu Tambahan Belanja Prioritas dalam Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016 sebesar Rp.360.000.000.000,-, dialokasikan pemanfaatannya pada:

- 1) Program Pendidikan Kepamongprajaan (Institut Pemerintahan Dalam Negeri), sebesar Rp.45.000.000.000,- untuk lanjutan pembangunan IPDN Kampus Kalimantan Barat dan rencana pengembangan IPDN Kampus Daerah (*master plan*).
- 2) Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (Ditjen Bina Politik dan Pemerintahan Umum), sebesar Rp.20.000.000.000,-, untuk pendanaan tugas Gubernur selaku penyelenggara urusan pemerintahan umum di provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain Forkopimda melalui mekanisme Dana Dekonsentrasi, dan pembinaannya, serta pentas budaya dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air pada hari-hari besar nasional.
- 3) Program Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemerintahan Desa), sebesar Rp.95.000.000.000,-, untuk pendampingan bagi pemerintah desa dengan komposisi 1 (satu) orang Pendamping Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) per kecamatan, pembangunan 170 Kantor Desa Percontohan, dan koordinasi pembinaan serta monitoring pembangunan Kantor Desa Percontohan. Terkait alokasi pembangunan kantor desa percontohan tersebut, diusulkan dialihkan menjadi bagian transfer daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
- 4) Program Bina Otonomi Daerah (Ditjen Otonomi Daerah), sebesar Rp.45.000.000.000,-, untuk evaluasi dan kajian Tim Independen, serta penetapan regulasi Daerah Persiapan DOB.
- 5) Program Penataan Administrasi Kependudukan (Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil), sebesar Rp.155.000.000.000,-, untuk penyediaan peralatan KTP-el pada daerah Kecamatan Pemekaran, dan relokasi Data Center Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari kompleks perkantoran Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi di Kalibata ke kantor Kementerian Dalam Negeri Pasar Minggu.

C. Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran

Berkenaan dengan Penetapan Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri TA.2016 sebesar Rp.5.124.503.315.000,-, diuraikan komposisinya sebagai berikut:

1. Pagu per Sumber Dana

- a. Rupiah Murni sebesar Rp.5.031.566.856.000,-;

- b. Rupiah Murni Pendamping sebesar Rp.6.809.583.000,-;
 - c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.49.266.626.000,-;
 - d. Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp.28.428.750.000,-; dan
 - e. Hibah Luar Negeri sebesar Rp.8.431.500.000,-.
2. Pagu per Jenis Belanja
- a. Belanja Operasional:
 - 1) Belanja Pegawai sebesar Rp.713.984.761.000,-;
 - 2) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp.505.636.511.000,-; dan
 - 3) Belanja Non Operasional Berkarakteristik Operasional sebesar Rp.1.000.000.000.000,-.
 - b. Belanja Non Operasional
 - 1) Belanja Barang : Rp.2.565.702.061.000,-
 - 2) Belanja Modal : Rp. 339.179.982.000,-
3. Pagu per Satker Pelaksana
- a. Kantor Pusat : Rp.3.339.807.344.000,-
 - b. Kantor Daerah (UPT Kemendagri) : Rp. 407.885.820.000,-
 - c. Dekonsentrasi : Rp. 679.996.198.000,-
 - d. Tugas Pembantuan : Rp. 696.813.953.000,-
4. Pagu per Program

No.	Program	Pagu (Rp)
1	2	3
Kementerian Dalam Negeri		5.124.503.315.000
1	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendagri	385.575.716.000
2	Pembinaan Politik Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	215.206.916.000
3	Bina Administrasi Kewilayahan	276.024.380.000
4	Bina Otonomi Daerah	208.105.867.000
5	Bina Pembangunan Daerah	332.029.260.000
6	Bina Pemerintahan Desa	1.076.357.205.000
7	Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	97.534.258.000
8	Penataan Administrasi Kependudukan	1.549.727.582.000
9	Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	69.860.709.000
10	Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri	55.904.831.000
11	Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	223.403.334.000
12	Pendidikan Kepamongprajaan	634.773.257.000

Selanjutnya, komposisi Pagu Alokasi Anggaran Kemendagri TA.2016 tersebut diatas, diuraikan secara rinci dalam Matriks Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran yang di dalamnya memuat target capaian kinerja dari 12 Program dan 75 Kegiatan (Lampiran II).

IV. PENUTUP

Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016 merupakan acuan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran tahun 2016 pada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Dalam pelaksanaan Renja tersebut masing-masing Satker mempedomani prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta melaporkan pencapaiannya secara periodik dan berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENTERI DALAM NEGERI

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016

PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016

I. SEKRETARIAT JENDERAL

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK	PAGU 2016 (Rp X 1000)			KET
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
010.01.01	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas lintas unit kerja di bidang perencanaan, keuangan dan pengelolaan BMN, administrasi kepegawaian, kelembagaan dan tata kelola, pelayanan data, informasi dan komunikasi publik, penataan produk hukum dan pelayanan bantuan hukum, serta pelayanan pengadaan barang/jasa dan pelayanan administrasi lainnya	239,803,324	143,772,392	383,575,716	
	1. Persentase Capaian Program Prioritas dan Kualitas Capaian Kinerja Kementerian Dalam Negeri	a. 100% tercapai program prioritas b. LAPKIN Kategori A				
	2. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Pengelolaan BMN	WTP				
	3. Tingkat Kepuasan Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri	a. 100% kepuasan terhadap pengelolaan SDM b. 100% kepuasan terhadap pelayanan komunikasi publik				
	4. Peningkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	70% (Kategori B)				
	5. Penyediaan data dan informasi Kementerian Dalam Negeri yang terintegrasi	45%				
	6. Persentase Penyelesaian Produk Hukum dan Sengketa Hukum Kementerian Dalam Negeri	60% penyelesaian produk hukum 100% penyelesaian sengketa hukum				
1214	PENATAAN PRODUK HUKUM DAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM	Meningkatnya keselarasan dan harmonisasi peraturan Perundang-undangan melalui kajian hukum dan kebijakan daerah, serta penyisipan produk hukum, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum, dan dokumentasi hukum lingkup Kementerian Dalam Negeri	-	8,000,000	8,000,000	
	1. Persentase Telaahan Kebijakan yang terfasilitasi	100%	-	1,735,165	1,735,165	
	2. Jumlah Peraturan Perundang-undangan Kemendagri yang masuk Prolegdagri	60 Rancangan Per-UU	-	1,664,017	1,664,017	
	3. Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum di Lembaga Peradilan dan Bantuan Hukum	100%	-	2,050,604	2,050,604	
	4. Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Biro Hukum	100%	-	2,550,214	2,550,214	
1215	PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya kualitas pengelolaan Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	200,000	19,800,000	20,000,000	
	1. Perencanaan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%	-	841,850	841,850	
	2. Tingkat Kepuasan Pegawai atas Pengelolaan SDM Kemendagri	100%	200,000	9,203,220	9,403,220	
	3. Jumlah PNS yang mengikuti penilaian kompetensi pegawai	3700 Orang	-	8,570,555	8,570,555	

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK	PAGU 2016 (Rp X 1000)			KET
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
	4. Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Biro Kepegawaian	100%	-	1,184,375	1,184,375	
1216	PENATAAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN REFORMASI BIROKRASI	Meningkatnya kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan unit layanan administrasi serta penerapan hasil analisis jabatan dan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	-	6,000,000	6,000,000	
	1. Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kemendagri	2 Permendagri 150 SOP	-	1,790,164	1,790,164	
	2. Persentase Penerapan Hasil Analisa Jabatan Kemendagri	85% Pelaksanaan Hasil Anjab	-	728,134	728,134	
	3. Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	70%	-	1,294,640	1,294,640	
	4. Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Biro Organisasi dan Tata Laksana	100%	-	2,187,062	2,187,062	
1217	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	Meningkatnya kualitas dan terimplementasinya secara optimal perencanaan program dan anggaran, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja program dan anggaran lingkup Kementerian Dalam Negeri	-	13,000,000	13,000,000	
	1. Persentase Konsistensi Rencana Program dan Anggaran Kementerian Dalam Negeri	100%	-	7,850,000	7,850,000	
	2. Persentase Capaian Program Prioritas dan Kualitas Capaian Kinerja Kementerian Dalam Negeri	100% LAPKIN kategori A	-	4,300,000	4,300,000	
	3. Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Biro Perencanaan	100%	-	850,000	850,000	
1218	PENGELOLAAN KETATAUSAHAAN, RUMAH TANGGA, SERTA SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN	Meningkatnya Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Layanan Pengadaan, Keamanan, serta Sarana dan Prasarana Perkantoran sesuai kebutuhan	65,290,185	33,035,068	98,325,253	
	1. Persentase Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Keamanan sesuai Kebutuhan	100%	-	9,112,213	9,112,213	
	2. Persentase Dukungan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Kemendagri	100%	-	3,000,000	3,000,000	
	3. Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan	100%	-	20,922,855	20,922,855	
	4. Persentase Penyelesaian Pelayanan Operasional Kerja (operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) lingkup Setjen yang tepat waktu	100%	65,290,185	-	65,290,185	
1219	PENATAAN FASILITASI KERJASAMA	Meningkatnya penataan fasilitasi kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan mitra dalam dan luar negeri	-	6,500,000	6,500,000	
	1. Persentase Fasilitasi Penataan Kerjasama Kemendagri dan Pemerintah Daerah dengan Dalam dan Luar Negeri	100%	-	4,350,000	4,350,000	
	2. Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Pusat Fasilitasi Kerja Sama	100%	-	2,150,000	2,150,000	
1220	PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Dalam Negeri	163,533,139	12,000,000	175,533,139	
	1. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kemendagri	WTP	-	5,086,795	5,086,795	

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK	PAGU 2016 (Rp X 1000)			KET
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
	2. Persentase Surat Permintaan Penyelesaian terkait Pengelolaan BMN di Lingkungan Kemendagri yang dapat di proses	100%	-	943,450	943,450	
	3. Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan lingkup Sekretariat Jenderal yang akuntabel dan tepat waktu	100%	-	2,857,377	2,857,377	
	4. Persentase Penyelesaian Kerugian Negara dan Perbendaharaan Lingkup Kemendagri	100%	-	2,068,568	2,068,568	
	5. Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai) yang tepat waktu	100%	163,533,139	-	163,533,139	
	6. Persentase Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Biro Keuangan dan Aset	100%	-	1,043,810	1,043,810	
1221	PENGLOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi serta pelayanan komunikasi dan telekomunikasi lingkup Kementerian Dalam Negeri	7,680,000	26,037,324	33,717,324	
	1. Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi Kemendagri	11 Dokumen Kebijakan	-	2,403,095	2,403,095	
	2. Pemanfaatan Data dan Informasi Pokok Kemendagri	40 data informasi/pokok	-	2,663,540	2,663,540	
	3. Pengelolaan Sistem Informasi Lingkup Kemendagri	10 aplikasi	-	2,334,230	2,334,230	
	4. Operasionalisasi Infrastruktur TIK lingkup Kemendagri	83% Infrastruktur TIK	7,680,000	6,362,075	14,042,075	
	5. Pelaksanaan Rakor regulars via teleconference Pusat dan Daerah	100%	-	12,274,384	12,274,384	
1222	PENGLOLAAN ADMINISTRASI PIMPINAN	Meningkatnya pengelolaan administrasi pimpinan dalam rangka penyisipan materi dan kebijakan, tata usaha serta keprotokolanan	3,000,000	11,300,000	14,300,000	
	1. Tingkat Ketepatan Waktu Operasional Ketatausahaan Pimpinan	100%	3,000,000	2,130,325	5,130,325	
	2. Persentase Terlaksananya Koordinasi Pimpinan dan Penyelenggaraan Keprotokolanan	100%	-	8,315,710	8,315,710	
	3. Persentase Penyisipan Materi Rapat, Materi Persidangan dan Materi Kebijakan Kementerian Dalam Negeri	100%	-	853,965	853,965	
1223	PENGLOLAAN KEHUMASAN	Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan penyerbuan informasi kepada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat serta pelayanan perpustakaan dan pendokumentasian	100,000	10,100,000	10,200,000	
	1. Persentase Fasilitasi dan Pelayanan Hubungan Masyarakat	100%	-	5,205,703	5,205,703	
	2. Persentase Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi	100%	-	2,217,920	2,217,920	
	3. Persentase Pelayanan Perpustakaan Kemendagri	100%	100,000	1,272,130	1,372,130	
	4. Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Pusat Penerangan	100%	-	1,404,247	1,404,247	

II. DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK	RENCANA BELANJA 2016 (Rp X 1000)			KET
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
010.03.11	PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya ketahanan dan kewaspadaan ideologi, wawasan kebangsaan, ekonomi dan sosial budaya	37,706,916	177,500,000	215,206,916	
	1. Jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam)	≤ 20				
	2. Jumlah konflik berlatar belakang isu SARA	≤ 5				
	3. Prosentase partisipasi politik dalam penyelenggaraan pemilu					
1231	PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Terlaksananya penyusunan kebijakan, fasilitasi dan dukungan bagi peningkatan peran organisasi politik dan kemasyarakatan		25,000,000	25,000,000	
	1. Jumlah peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang organisasi kemasyarakatan	2 Permendagri, 2 modul		1,050,000	1,050,000	AP
	2. Jumlah daerah yang mendapat peningkatan kinerja pelayanan Pendaftaran, data base, sistem informasi, pengawasan, penyelesaian sengketa, monitoring dan evaluasi terhadap ormas dan ormas yang didirikan oleh warga negara asing	34 Provinsi		6,330,000	6,330,000	AP
	3. Jumlah kemitraan pemerintah dengan ormas dalam rangka pendidikan politik dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	200 ormas		10,000,000	10,000,000	AP
	4. Jumlah ormas yang bermitra untuk peningkatan kapasitas kelompok perempuan, penyandang difabel dan kelompok rentan / marginal lain melalui kemitraan dengan ormas	100 ormas		5,000,000	5,000,000	AP
	5. Jumlah fasilitasi kemitraan ormas dengan lembaga non pemerintah (swasta, perguruan tinggi, sesama ormas, dll) dan pengembangan forum pemberdayaan ormas	20 LNP		950,000	950,000	AP
	6. Jumlah ormas yang mendapatkan peningkatan kompetensi/kualitas melalui penguatan kepemimpinan dan kaderisasi yang berwawasan kebangsaan dan memperkuat ketahanan nasional serta pengembangan keterampilan dalam rangka mendorong kemandirian dan akuntabilitas ormas	20 Ormas		500,000	500,000	AP
	7. Penyusunan pengukuran kinerja ormas	1 dokumen		1,170,000	1,170,000	AP
1232	FASILITASI POLITIK DALAM NEGERI	Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik		28,575,000	28,575,000	
	1. Jumlah peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang politik	2 NA UU bidang politik, 1 Permendagri		461,401	461,401	AP
	2. Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog di masyarakat terkait dengan pendidikan politik warga termasuk yang mawadahi unsur pemerintah, ormas, dunia usaha dan media di tingkat nasional dan daerah	5 Forum		8,388,472	8,388,472	AP
	3. Jumlah parpol yang mendapatkan bantuan keuangan dan peningkatan kapasitas	10 Parpol		13,925,300	13,925,300	AP
	4. Jumlah daerah yang menerapkan pelaksanaan best practice pendidikan politik	15 Provinsi		1,857,110	1,857,110	AP

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK	RENCANA BELANJA 2016 (Rp X 1000)			KET
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
	5 Jumlah Pengembangan sistem pengetahuan kewarganegaraan melalui pengembangan dan pemanfaatan media layanan yang memiliki jangkauan luas	10 Topik		1,125,000	1,125,000	AP
	6 Jumlah daerah yang terfasilitasi pendidikan politik untuk politisi perempuan	6 Provinsi		1,800,740	1,800,740	AP
	7 Jumlah penguatan Pokja Demokrasi	34 Provinsi		344,588	344,588	AP
	8 Penyusunan gagasan DTF (Dana Abadi Demokrasi)	1 dokumen		672,389	672,389	AP
1233	FASILITASI KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Terlaksananya penyusunan kebijakan, pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		20,425,000	20,425,000	
	1 Jumlah peraturan dan pedoman bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	1 Modul		200,000	200,000	AP
	2 Jumlah daerah yang terfasilitasi pendidikan kebhinekaan dengan menggunakan pendekatan Sosial dan Budaya	7 Provinsi		2,700,000	2,700,000	AP
	3 Jumlah daerah yang mendapat fasilitasi forum pertemuan, rapat koordinasi terkait dengan isu kesenjangan ekonomi dan Konflik perubatan SDA yang melibatkan pemerintah, CSO, Dunia Usaha dan Media Sosial dalam Rangka Pembinaan Ketahanan Ekonomi dengan melibatkan lembaga terkait	8 Provinsi		6,425,000	6,425,000	AP
	4 Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog (forum komunikasi dan konsultasi) di masyarakat terkait dengan ketahanan budaya, agama dan kemasyarakatan	28 Forum		7,600,000	7,600,000	AP
	5 Jumlah Forum Komunikasi dan Koordinasi Pengembangan Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	1 nusantara expo dan forum		1,500,000	1,500,000	AP
	6 Jumlah daerah yang terpetakan terkait dengan ketahanan sosial, seni dan budaya	16 Provinsi		1,500,000	1,500,000	AP
	7 Jumlah hasil monitoring dan evaluasi serta pemantauan bidang ketahanan ekonomi melalui SIM	7 Dokumen		500,000	500,000	AP
1234	FASILITASI KEWASPADAAN NASIONAL	Terlaksananya penyusunan kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik		27,200,000	27,200,000	
	1 Jumlah penyusunan peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang kewaspadaan nasional	1 Modul		200,000	200,000	AP
	2 Jumlah daerah yang mendapatkan Penguatan dan pemberdayaan forum dialog kewaspadaan nasional (penanganan konflik sosial) seluruh Indonesia	34 Provinsi		6,600,000	6,600,000	AP
	3 Jumlah kegiatan penguatan kapasitas : a) Masyarakat terkait mekanisme deteksi dini dan cegah dini dalam menangkal ancaman dari dalam dan luar b) Aparatur Pemda	34 Provinsi		7,900,000	7,900,000	AP
	4 Jumlah daerah yang telah dipetakan, Pemantauan dan Pelaporan situasi Daerah secara efektif dan teratur di 34 Provinsi	34 Provinsi		2,800,000	2,800,000	AP
	5 Jumlah daerah dalam peningkatan kinerja tim terpadu penanganan konflik sosial dalam rangka penanganan konflik	34 Provinsi		6,200,000	6,200,000	AP
	6 Jumlah Peningkatan layanan publik khususnya administrasi, Lembaga Asing dan orang asing	170 Rekomendasi		1,200,000	1,200,000	AP

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK	RENCANA BELANJA 2016 (Rp X 1000)			KET
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
	7 Pengembangan sistem peringatan dini dalam penanganan konflik	1 pembangunan & pengembangan sistem (dasar hukum dan aplikasi)		2,300,000	2,300,000	AP
1235	BINA IDEOLOGI, KARAKTER DAN WAWASAN KEBANGSAAN	Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan		26,800,000	26,800,000	
	1 Jumlah Peraturan perundang-undangan dan pedoman dalam rangka penguatan karakter bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945	1 modul		200,000	200,000	AP
	2 Jumlah daerah melaksanakan penguatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	34 Prov		20,050,000	20,050,000	AP
	3 Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya dan masyarakat dalam rangka penguatan karakter bangsa	7 Angkatan (5 Pembauran dan 2 Nilai Sejarah Kebangsaan)		2,000,000	2,000,000	AP
	4 Jumlah daerah yang terfasilitasi pendidikan kewarganegaraan	17 Provinsi		1,000,000	1,000,000	AP
	5 Jumlah fasilitasi kampanye Nasional terkait revolusi mental dan restorasi sosial (Qc)	34 Provinsi, 34 K/L, 27 LPNK		1,700,000	1,700,000	QW
	6 Jumlah penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dan tersedianya database serta pemutakhiran terkait pemetaan dan identifikasi nilai-nilai dasar (memperkuat harga diri, karakter, wasbang dan daya saing bangsa)	34 Provinsi		1,850,000	1,850,000	AP
1236	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DI/TJEN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Peningkatan dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	37,706,916	49,500,000	87,206,916	
	1 Jumlah Dokumen perencanaan, data dan informasi serta konsistensi pelaporan kinerja yang diselesaikan secara akuntabel dan tepat waktu	16 Dokumen		8,000,000	8,000,000	KL
	2 Jumlah Penataan kelembagaan instansi vertikal	34 Provinsi		21,000,000	21,000,000	KL
	3 Jumlah dokumen keuangan tahunan, dan laporan pengelolaan keuangan/kinerja keuangan sesuai Sistem Akuntansi Instansi (SAI) lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	18 dokumen		4,000,000	4,000,000	KL
	4 Jumlah dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi, penataan urusan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan Urusan Pemerintahan Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	10 dokumen		10,500,000	10,500,000	KL
	5 Jumlah Penyelesaian Operasional kerumahaan, perlengkapan dan Ketatausahaan Lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	3 dokumen		3,385,000	3,385,000	KL
	6 Persentase Penyelesaian pelayanan dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta langganan daya & Jasa) yang tepat waktu	100%	37,706,916		37,706,916	KL
	7 Jumlah Pengadaan sarana dan/Prasarana non mengikat	100%		2,615,000	2,615,000	KL

III. DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK	PAGU 2016 (Rp X 1.000)			KET
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
010.04.08	BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	Meningkatnya Konsolidasi Kebijakan dan Standardisasi Teknis Bidang Administrasi Kewilayahan	40,358,343	235,666,037	276,024,380	
	Meningkatnya konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerjasama daerah, serta penataan wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus dan kawasan perkotaan), dan batas antar negara					
	1	Prosentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah				P
	2	Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah				
	3	Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah				
	4	Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat				AP
	Meningkatnya standarisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang pp dan linmas serta pencegahan dan penganggulangan bencana dan bahaya kebencanaan					
	5	Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SFM (Standar Pelayanan Minimal)				
	6	Penyediaan layanan dasar bidang penganggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SFM (Standar Pelayanan Minimal)				AP
1237	Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah	Peningkatan penyelenggaraan hubungan Pusat dan Daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan	-	51,314,000	51,314,000	
	1	Jumlah Kabupaten/kota yang menerapkan Permendagri tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		3,850,000	3,850,000	AP
	2	Jumlah rumusan kebijakan bidang peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan		5,650,000	5,650,000	
	3	Persentase fasilitasi pusat dan daerah bidang peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan		1,600,000	1,600,000	
	4	Jumlah Provinsi yang dibina dalam rangka peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi		24,900,000	24,900,000	AP
	5	Jumlah daerah yang terpelihara dan meningkat kualitas kerjasamanya terhadap kerjasama yang telah dilaksanakan		2,000,000	2,000,000	AP
	6	Jumlah Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah yang bersifat wajib		1,300,000	1,300,000	AP
	7	Jumlah jenis dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dievaluasi berdasarkan prinsip dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang benar		3,514,000	3,514,000	

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK	PAGU 2016 (Rp X 1.000)			KET
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
	8	Jumlah kumulatif Kecamatan yang menyelenggarakan tugas-tugas pembinaan administrasi kewilayahan dan pemerintahan umum		500,000	500,000	
	9	Jumlah daerah pilot project operasionalisasi pelayanan umum melalui PTSP		1,500,000	1,500,000	QW
	10	Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima (Jenis Perijinan yang diimpahkan ke PTSP, Penederhanan Perijinan, Kecepatan Pelayanan, Kualitas Pelayanan, Peningkatan Kapasitas SDM Perijinan)		3,100,000	3,100,000	AP
	11	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kelembagaan, Infrastruktur Ekonomi, dan Daya Saing Perencanaan Daerah (khususnya Fasilitasi PTSP)		3,400,000	3,400,000	AP
1238	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN DAN BATAS NEGARA	Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar yang dikembangkan		50,800,000	50,800,000	
	1	Jumlah rumusan kebijakan dan produk hukum bidang kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan Batas Negara serta pulau-pulau kecil terluar		2,600,000	2,600,000	AP
	2	Persentase fasilitasi pusat dan daerah bidang kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar		2,600,000	2,600,000	
	3	Jumlah daerah yang difasilitasi penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan daerah dalam pengelolaan bidang kawasan khusus, pertanahan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar		2,400,000	2,400,000	AP
	4	Jumlah kawasan khusus yang dikelola dan dikembangkan		3,300,000	3,300,000	AP
	5	Persentase pendataan dan pemetaan perijinan pemanfaatan kawasan dan pertanahan		1,900,000	1,900,000	
	6	Jumlah provinsi yang melaksanakan kerjasama perbatasan antar negara (JIM, SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG)		3,800,000	3,800,000	AP
	7	Jumlah kesepakatan batas antar negara dalam rangka penyelesaian batas dan hubungan antar negara yang berbatasan		7,200,000	7,200,000	AP
	8	Jumlah sarpras yang dialokasikan bagi daerah perbatasan antar negara dan pulau-pulau kecil terluar dalam rangka pelayanan pemerintahan		20,500,000	20,500,000	AP
	9	Jumlah Daerah yang terfasilitasi sesuai Sistem Pengendalian Pengelolaan Pemenuhan SPP untuk perwujudan Kota Berkelanjutan		1,000,000	1,000,000	AP
	10	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terfasilitasi dalam pembentukan mekanisme dan lembaga kerja sama		500,000	500,000	AP
	11	Jumlah kota otonom dan kota baru publik yang terfasilitasi dalam pembentukan kelembagaan dan perencanaan infrastruktur dasar sesuai SPP		600,000	600,000	AP

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK	PAGU 2016 (Rp X 1.000)			KET
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
	12 Jumlah Kota yang Terfasilitasi dalam Penyediaan Peta Perkotaan dan Kawasan Perkotaan yang terpadu skala 1:1000	5 kawasan perkotaan metropolitan, 5 kota sedang		2,500,000	2,500,000	AP
	13 Jumlah Kota yang Terfasilitasi melalui pemantapan Teknis Updating Basis Data Informasi Perkotaan	3 kawasan perkotaan metropolitan, 5 kota sedang		500,000	500,000	AP
	14 Jumlah pelaksanaan evaluasi penataan perkotaan	4 Dokumen		1,000,000	1,000,000	AP
	15 Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam kerjasama pembangunan antar kota dan antar kota/kab baik dalam negeri dan luar negeri (siter city)	12 Kab/Kota		400,000	400,000	AP
1239	PEMBINAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat	-	27,400,000	27,400,000	
	1 Jumlah rumusan kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perlindungan Masyarakat, serta Hak Sipil dan HAM	5 Rumusan Kebijakan	-	2,500,000	2,500,000	
	2 Persentase fasilitasi pusat dan daerah Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Hak Sipil dan HAM	60%	-	4,350,000	4,350,000	
	3 Jumlah daerah Kabupaten/Kota yang membentuk Kelembagaan Satpol PP sesuai peraturan perundang-undangan	50 kab/kota	-	7,300,000	7,300,000	
	4 Jumlah daerah Kabupaten/kota yang mempunyai aparat Satpol PP/PPNS dan Satlinmas yang sesuai standar	1.534 org (target renstra 2.271 org)	-	8,150,000	8,150,000	
	5 Jumlah daerah yang melaksanakan sistem dan prosedur operasional penyelenggaraan bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat	8 daerah	-	300,000	300,000	
	6 Persentase daerah yang telah memfasilitasi 5P (penghormatan, pemenuhan, penegakan dan perlindungan) hak asasi manusia serta fasilitasi konferensi internasional bagi aparat Satpol PP	85%	-	1,500,000	1,500,000	
	7 Prosentasi fasilitasi gerakan tertib dan disiplin nasional dalam rangka mewujudkan karakter bangsa	65%	-	2,000,000	2,000,000	
	8 Persentase kesiapsiagaan satgas entry/ transit/ daerah asal	100%	-	1,300,000	1,300,000	
1240	FASILITASI PENCEGAHAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN	Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran	-	52,649,573	52,649,573	
	1 Jumlah rumusan kebijakan bidang Pengurangan Resiko Bencana, Sarana dan Prasarana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, Standardisasi Pemadam Kebakaran dan SDM Damkar	4 Rumusan Kebijakan	-	2,400,000	2,400,000	
	2 Persentase fasilitasi pusat dan daerah bidang Pengurangan Resiko Bencana, Sarana dan Prasarana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, Standardisasi Pemadam Kebakaran dan SDM Damkar	60%	-	10,249,573	10,249,573	

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK	PAGU 2016 (Rp X 1.000)			KET
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
	3 Jumlah aparat daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran	10 daerah (50 orang/daerah) (target RKP 30 daerah (50 orang/daerah))	-	9,700,000	9,700,000	AP
	4 Jumlah sarpras yang disediakan bagi pusat dan daerah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran	20 Sarpras (Target Renstra 40)	-	26,600,000	26,600,000	
	5 Persentase implementasi penerapan SPM bidang pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan	25%	-	1,700,000	1,700,000	
	6 Jumlah kumulatif daerah yang melakukan kerjasama dalam penanggulangan bencana dan kebakaran	60 Daerah	-	500,000	500,000	
	7 Persentase peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam upaya pengurangan resiko bencana dan kebakaran	65%	-	1,500,000	1,500,000	
1241	PENATAAN WILAYAH ADMINISTRASI, PENEGASAN BATAS DAERAH, DAN TOPONIMI	Peningkatan penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi	-	33,600,000	33,600,000	
	1 Jumlah rumusan kebijakan bidang penataan administrasi wilayah dan penegasan batas daerah serta toponimi	35 Rumusan Kebijakan	-	4,500,000	4,500,000	AP
	2 Persentase fasilitasi pusat dan daerah bidang penataan administrasi wilayah dan penegasan batas daerah serta toponimi	60%	-	8,900,000	8,900,000	
	3 Jumlah segmen batas antar daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundangan	50 Segmen	-	1,500,000	1,500,000	AP
	4 Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penegasan batas daerah dan pembakuan nama rupa bumi	28 Daerah	-	16,750,000	16,750,000	
	5 Persentase pembakuan rupabumi unsur buatan dan warisan budaya	50%	-	1,950,000	1,950,000	
1242	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIK LAINNYA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	Peningkatan dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	40,358,343	19,902,464	60,260,807	
	1 Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran (Renstra, Renja, RKP, RKA, RKAKL dan Petunjuk Operasional)	100%	-	2,500,000	2,500,000	
	2 Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi, laporan keuangan aset, laporan kinerja serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP	100%	-	7,200,437	7,200,437	
	3 Persentase penyusunan pedoman/juknis dan rancangan peraturan serta dokumen ketatalaksanaan yang diselesaikan	100%	-	3,052,027	3,052,027	
	4 Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan kepegawaian	100%	-	1,500,000	1,500,000	
	5 Persentase pengadaan sarana dan prasarana	80%	-	2,200,000	2,200,000	
	6 Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana	100%	-	1,300,000	1,300,000	
	7 Persentase Pembinaan Bidang Administrasi Kewilayahan di pusat dan daerah	100%	-	2,150,000	2,150,000	
	8 Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	100%	40,358,343	-	40,358,343	

IV. DITJEN OTONOMI DAERAH

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK	RENCANA BELANJA 2016 (Rp X 1000)			KET
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
010.07.07	BINA OTONOMI DAERAH	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia	38,538,419	169,567,448	208,105,867	
	1 Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	60% daerah provinsi yang berkinerja tinggi 50% daerah kab/kota yang berkinerja tinggi				
	2 Peningkatan kinerja pemerintahan daerah otonom baru	40% DOB yang berkinerja baik dari total jumlah DOB				
	3 Peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan otsus/keistimewaan daerah	60% keberhasilan penerapan ketentuan/kebijakan otsus/keistimewaan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan				
1258	KEGIATAN FASILITASI KDH, DPRD DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan daerah pada setiap entitas penyelenggara pemerintahan daerah		15,000,000		
	1 Penyusunan serta tindak lanjut Peraturan/Kebijakan tentang Pejabat Negara dan DPRD	4 peraturan		4,000,000		KL
	2 Fasilitasi Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD	2 Gubernur dan Pimpinan DPRD, 83 Bupati dan Pimpinan DPRD, 15 Walikota dan Pimpinan dan Anggota DPRD		7,500,000		AP
	3 Pembinaan dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan daerah	7 asosiasi daerah dan 100 LKPJ		3,000,000		KL
	4 Jumlah Pemimpin Daerah Kab/Kota yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas yang Visioner dan Inovatif	5 Kab/kota		500,000		KL
1259	KEGIATAN PENATAAN DAERAH OTONOM DAN OTONOMI KHUSUS DAN DPOD	Meningkatnya pemahaman penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam penerapan desentralisasi asimetrik dan generik serta tata kelola pemerintahan daerah		71,000,000		
	1 Presentase pelaksanaan evaluasi perkembangan DOB yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang	100%		2,500,000		AP
	2 Penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur penataan daerah, otonomi khusus/istimewa dan DPOD serta Terlaksananya penyempurnaan kerangka regulasi otonomi khusus	6 Rancangan Peraturan perundang-undangan		4,000,000		AP
	3 Fasilitasi pelaksanaan kebijakan penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa	- 18 DOB - 4 daerah otsus - 1 daerah istimewa		4,500,000		KL
	4 Evaluasi daerah otonom khusus/istimewa dalam rangka pembenahan terhadap kelembagaan, aparatur dan pendanaan pelaksanaan otsus	Papua, Papua Barat, DKI Jakarta D.I.Yogyakarta dan Aceh		3,000,000		PL
	5 Fasilitasi penyusunan kebijakan DPOD	4 Kajian		4,000,000		KL
	6 Evaluasi dan verifikasi rencana/usulan pembentukan DOB dan Implementasi kebijakan penataan daerah	54 dokumen usulan		48,000,000		AP
	7 Jumlah regulasi daerah yg diterbitkan dlm rangka pemantapan sistem tata kelola pemerintahan yg baik di Papua dan Papua Barat	2 Perdasi dan Perdasus di Papua dan Papua Barat		1,000,000		QW
	8 Jumlah NSPK dlm rangka Penguatan kelembagaan badan percepatan pembangunan kawasan Papua dan Papua Barat	2 NSPK		1,000,000		QW

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK	RENCANA BELANJA 2016 (Rp X 1000)			KET
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
	9 Presentase jumlah daerah otonom baru yang meningkat kinerja pemerintahannya	40%		1,500,000		AP
	10 Fasilitasi daerah dalam peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah otonomi khusus/daerah istimewa	5 daerah		1,500,000		AP
1261	KEGIATAN EVALUASI KINERJA DAERAH DAN PENINGKATAN KAPASITAS	Meningkatnya kemampuan dan prakarsa pemerintahan daerah terhadap pencapaian kinerja dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah		21,000,000		
	1 Penyusunan serta tindak lanjut Pedoman/ Kebijakan Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	5 Peraturan		2,000,000		KL
	2 Persentase Daerah Provinsi dalam rangka Fasilitasi Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	85% daerah provinsi berkinerja tinggi berdasarkan EKPPD		9,000,000		AP
	3 Fasilitasi Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah	20% dari daerah kabupaten/kota yang berkinerja sedang kebawah		5,000,000		KL
	4 Persentase Daerah Kabupaten/kota dalam rangka Fasilitasi Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	70% daerah Kabupaten/kota berkinerja tinggi berdasarkan EKPPD		5,000,000		AP
1264	FASILITASI KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya efektifitas kebijakan kelembagaan, pelaksanaan analisis jabatan, tatalaksana dan evaluasi kelembagaan daerah dan pembinaan umum kepegawaian pada perangkat daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah		27,000,000		
	1 Penyusunan serta tindak lanjut peraturan/kebijakan tentang kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah	1 PP pengganti PP No 41 Tahun 2007, 1 permendagri		1,000,000		AP
	2 Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang terfasilitasi dalam pembentukan dan peningkatan kapasitas kelembagaan perkotaan	10 Prov, 10 Kab dan 10 Kota		6,000,000		AP
	3 Jumlah Kota yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas pemerintah kota melalui pencitraan kota (City Branding)	5 Kota Sedang		1,000,000		AP
	4 fasilitasi dan koordinasi Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka penataan kelembagaan daerah	32 Beban Kerja Urusan		3,000,000		KL
	5 Fasilitasi pelaksanaan analisis jabatan dan evaluasi kelembagaan daerah	34 Prov		3,000,000		KL
	6 Fasilitasi penataan ketatalaksanaan kelembagaan daerah	34 Prov		2,000,000		KL
	7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan umum penataan kelembagaan daerah, dan kepegawaian pada perangkat daerah	Pembinaan umum penataan kelembagaan daerah, dan kepegawaian pada perangkat daerah (Prov dan Kab/Kota) di 10 Prov		2,000,000		KL
	8 Fasilitasi pembinaan administrasi dan sistem pengelolaan kepegawaian pada perangkat daerah	34 Prov		3,000,000		KL
	9 Prosentase Layanan Pengelolaan mutasi dan Administrasi Aparatur Sipil Negara di Daerah	100% Proses Layanan		3,000,000		KL
	10 Fasilitasi pembinaan umum jabatan fungsional dan Standar kompetensi di daerah	34 Prov		3,000,000		KL

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK	RENCANA BELANJA 2016 (Rp X 1000)			KET
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
1265	KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TERNIS LAINNYA DITJEN OTDA	Meningkatnya kapasitas koordinasi dan pembinaan pemerintahan daerah secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah	38,538,419	15,067,448		
	1 Jumlah penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran	3 Dokumen		3,317,448		KL
	2 Persentase penyelesaian laporan keuangan yang sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah (SAF)	100%		2,750,000		KL
	3 Pengembangan SDM dan penyelesaian urusan kepegawaian tepat waktu	100%		1,500,000		KL
	4 Fasilitasi sarana dan prasarana sesuai kebutuhan lingkup Ditjen Otonomi Daerah	100%		3,500,000		KL
	5 Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional, dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	100%	38,538,419			KL
	6 Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penyelesaian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang otonomi daerah	6 peraturan perundangan		4,000,000		AP
3991	FASILITASI PENATAAN PRODUK HUKUM DAERAH	Meningkatnya keselarasan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesesuaian		20,500,000		
	1 Jumlah produk hukum provinsi yang dievaluasi	265 produk hukum daerah		5,500,000		KL
	2 Cakupan pembinaan dan fasilitasi (sosialisasi, koordinasi, bimtek, advokasi serta monitoring dan evaluasi) penyusunan produk hukum daerah	34 Prov		6,500,000		KL
	3 Persentase jumlah produk hukum daerah yang di register	100%		1,000,000		KL
	4 Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya	100%		3,000,000		KL
	5 Persentase Pembatalan Perda dan Perkada yang bermasalah	100%		3,500,000		AP
	6 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang di Evaluasi dan/atau di Konsultasikan (kecuali RPJMD, RTRW, APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah)	350 rancangan perda		1,000,000		AP

V. DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK	RENCANA BELANJA 2016 (Rp X 1000)			KET
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
010.06.06	BINA PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional	46,920,028	285,109,232	332,029,260	
	1 Persentase konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah	60%				
	2 Persentase / Jumlah daerah yang menyelenggarakan SIPD	11 provinsi				
	3 Persentase penyelesaian perselisihan antar susunan tingkat pemerintahan terkait dengan urusan pemerintahan	100%				
	4 Persentase Penerapan indikator utama SPM di daerah	100% (6 SPM)				
	5 Persentase Penerapan NSPK di daerah	100% (32 Urusan)				
1251	KEGIATAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanahan dan Penataan Ruang, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pertanian dan Pangan, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup		73,220,167	73,220,167	
	1 Persentase ketersediaan data dan informasi lingkup UPD I	35%		2,545,176	2,545,176	KL
	2 Jumlah pedoman pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah I	6 Urusan		1,675,099	1,675,099	KL
	3 Persentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat UPD I	100%		2,000,000	2,000,000	KL
	4 Jumlah regulasi dan NSPK urusan Penataan Ruang yang sudah mengakomodir kebijakan sektoral	3 Permendagri		1,285,426	1,285,426	AP
	5 Jumlah pelaksanaan Rakernas BKPRN dan RAKORNAS BKPRD dalam rangka meningkatkan kualitas koordinasi kelembagaan penataan ruang	2 Kegiatan (Raker Reg)		467,950	467,950	AP
	6 Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan penataan ruang daerah yang melibatkan forum masyarakat	34 Prov		112,940	112,940	AP
	7 Jumlah daerah yang menyusun Perda RTRW prov/Kab - kota dan Perda RRTR	55 Kabupaten/Kota		302,890	302,890	AP
	8 Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penerapan tata kelola penataan ruang kawasan di daerah	34 Provinsi		208,274	208,274	AP
	9 Jumlah daerah yang terfasilitasi dan meningkat dalam penerapan tata kelola penataan ruang	34 Provinsi		610,890	610,890	AP
	10 Jumlah daerah yang dimonitor dan dievaluasi dalam penerapan tata kelola penataan ruang	34 Provinsi		384,825	384,825	AP
	11 Cakupan pembinaan umum (fasilitasi dan konsultasi, sosialisasi, koordinasi, bimtek, advokasi serta monitoring dan evaluasi) pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di tingkat pusat dan daerah terhadap urusan pemerintahan lingkup UPD I	7 Urusan		62,663,897	62,663,897	AP
	12 Penerapan Indikator Utama pelayanan publik di daerah lingkup UPD I yang ditekankan pada Reformasi pelayanan publik dasar Penataan Ruang serta urusan lingkup UPD I (PN)	1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi Penataan Ruang; 3 Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar meliputi		962,800	962,800	AP

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK	RENCANA BELANJA 2016 (Rp X 1000)			KET
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL	JUMLAH	
1252	KEGIATAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH III	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan, Sosial dan Budaya, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal, Perindustrian dan Perdagangan, dan Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Urusan Kemendagri	-	28,431,500	28,431,500	
1	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkup UPD III	35%		2,901,585	2,901,585	KL
2	Jumlah Pedoman pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah III	11 Urusan		2,195,059	2,195,059	KL
3	Persentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat UPD III	100%		2,000,000	2,000,000	KL
4	Jumlah Kebijakan/pedoman terkait dengan peningkatan kualitas tata kelola dan daya saing perekonomian daerah yang diselesaikan	1 Peraturan, 1 Permendagri		1,073,748	1,073,748	AP
5	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan, infrastruktur ekonomi dan daya saing perekonomian daerah	2 Laporan		400,000	400,000	AP
6	Cakupan pembinaan umum (fasilitasi dan Konsultasi, Sosialisasi, Koordinasi, bimtek, advokasi serta monitoring dan evaluasi) pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di tingkat pusat dan daerah terhadap urusan pemerintahan lingkup UPD III	11 urusan		15,984,344	15,984,344	AP
7	Penerapan Indikator Utama pelayanan publik di daerah lingkup UPD III yang ditekankan pada Reformasi pelayanan publik dasar Kesehatan, Sosial dan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri (Trantibum Linmas), serta urusan lingkup UPD III (PW)	3 Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi Kesehatan, Sosial, Trantibum linmas. 5 Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar meliputi Budaya, Koperasi-UKM, Penanaman Modal, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta administrasi kependudukan dan catatan sipil		1,991,248	1,991,248	AP
8	Penerapan Indikator Utama Inovasi dan daya saing daerah	5 Provinsi		670,032	670,032	AP
9	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi/terkoordinasi dalam pemenuhan SPM pelayanan dasar untuk masyarakat kurang mampu lingkup UPD III	10 kabupaten		1,215,484	1,215,484	AP
1253	KEGIATAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH II	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman, Kelautan dan Perikanan, Perhubungan, Komunikasi, informatika, statistika dan persandian	-	67,238,333	67,238,333	
1	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkup UPD II	35%		3,157,730	3,157,730	KL
2	Jumlah Pedoman pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah II	7 Urusan		1,583,440	1,583,440	KL
3	Persentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat UPD II	100%		1,700,000	1,700,000	KL
4	Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam pengelolaan sumber daya air	18 Prov, 150 kab/kota		31,488,333	31,488,337	AP
5	Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam penerapan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah/kawasan	8 Provinsi, 102 Kab/Kota		15,626,152	15,626,152	AP
6	Jumlah regulasi dan kebijakan pembangunan daerah berbasis wilayah/kawasan	1 PP		1,500,000	1,500,000	AP

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK	RENCANA BELANJA 2016 (Rp X 1000)			KET
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL	JUMLAH	
7	Cakupan pembinaan umum (fasilitasi dan konsultasi, sosialisasi, koordinasi, bimtek, advokasi serta monitoring dan evaluasi) pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di tingkat pusat dan daerah terhadap urusan pemerintahan lingkup UPD II	7 Urusan		10,211,373	10,211,373	AP
8	Penerapan Indikator Utama pelayanan publik di daerah lingkup UPD II yang ditekankan pada Reformasi pelayanan publik dasar Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan lingkup UPD II	2 Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 4 Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar meliputi Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Statistika, Persandian		1,197,965	1,197,965	AP
9	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi/terkoordinasi dalam pemenuhan SPM pelayanan dasar untuk masyarakat kurang mampu lingkup UPD II	10 Kabupaten		773,340	773,340	AP
1254	FASILITASI PERENCANAAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	-	31,500,000	31,500,000	
1	Jumlah Peraturan/ Kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Ditetapkan	3 Pedoman		5,350,000	5,350,000	KL
2	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penyusunan rencana pembangunan daerah sesuai peraturan perundang-undangan	34 provinsi		3,400,000	3,400,000	AP
3	Persentase monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	100%		250,000	250,000	KL
4	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pusat dan Daerah dalam Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	40%		500,000	500,000	KL
5	Persentase konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	75%		5,500,000	5,500,000	KL
6	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	50%		8,000,000	8,000,000	KL
7	Persentase keselarasan rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional	30%		2,750,000	2,750,000	KL
8	Jumlah rancangan Teknokratik RPJMD provinsi yang dievaluasi pada provinsi yang melaksanakan pemitukada	9 Rancangan Peraturan Daerah		1,000,000	1,000,000	KL
9	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah	30%		500,000	500,000	KL
10	Persentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah	100%		1,500,000	1,500,000	KL
11	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam Musrenbangda Provinsi dan Regional	34 Provinsi		2,000,000	2,000,000	PL
12	Terbangunnya media/sarana bagi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah	12 Provinsi		750,000	750,000	PL

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK	RENCANA BELANJA 2016 (Rp X 1000)			KET
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL	JUMLAH	
1255	KEGIATAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH IV	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, dan Arsip	-	23,000,000	23,000,000	
1	Persentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat UPD IV	100%		2,500,000	2,500,000	KL
2	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkup UPD IV	35%		2,987,561	2,987,561	KL
3	Jumlah pedoman pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah IV	8 Urusan		2,594,900	2,594,900	KL
4	Cakupan pembinaan umum (fasilitasi dan konsultasi, sosialisasi, koordinasi, bimtek, advokasi serta monitoring dan evaluasi) pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di tingkat pusat dan daerah terhadap urusan pemerintahan lingkup UPD IV	8 Urusan		12,535,656	12,535,656	AP
5	Penerapan Indikator Utama pelayanan publik di daerah lingkup UPD IV yang ditekankan pada Reformasi pelayanan publik dasar pendidikan, serta urusan wajib non SPM lingkup UPD IV	1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi Pendidikan; 6 Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar meliputi Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga, Perpustakaan dan Arsip		1,581,883	1,581,883	AP
6	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi/terkoordinasi dalam pemenuhan SPM pelayanan dasar untuk masyarakat kurang mampu lingkup UPD IV (PB)	10 Kabupaten		800,000	800,000	AP
1256	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA	Dukungan Pelayanan teknis administratif yang berkualitas di lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah	46,920,028	61,719,232	108,639,260	
1	Persentase Penyelesaian Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program dan Kegiatan Ditjen Bina Bangsa	100%		3,088,968	3,088,968	KL
2	Persentase Penyelesaian Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan	100%		6,000,000	6,000,000	KL
3	Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (01 dan 02) yang Tepat Waktu	100%	46,920,028	-	46,920,028	KL
4	Persentase Dukungan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana pada Ditjen Bina Bangsa	100%		10,650,000	10,650,000	KL
5	Persentase Fasilitas Data dan Informasi, Sistem dan Prosedur Lingkup Ditjen Bina Bangsa	100%		5,769,232	5,769,232	KL
6	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur di Lingkungan Ditjen Bina Bangsa	100%		1,850,000	1,850,000	KL
7	Persentase fasilitas Penyusunan Program Legislasi, Advokasi, serta Dokumentasi dan Informasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Ditjen Bina Bangsa	100%		4,000,000	4,000,000	KL
8	Persentase Dukungan Tugas Teknis dan Fungsional Lainnya pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah	100%		30,361,032	30,361,032	KL

VI. DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK	RENCANA BELANJA 2016 (Rp X 1000)			KET
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
010.05.13	BINA PEMERINTAHAN DESA	Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Mampu Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat	82,474,633	993,882,572	1,076,357,205	
1	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	7.094 Desa				
2	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa	7.094 Desa				
1243	KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA LINGKUP REGIONAL	Meningkatnya Kapasitas Aparat Pemerintahan Desa Dalam Manajemen Pemerintahan Desa	22,729,085	45,669,088	68,398,173	
	Balai Pemerintahan Desa Malang		6,899,154	14,816,668	21,715,822	
1	Jumlah Kumulatif Aparat Desa/Kelurahan yang Terampil Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1530 orang	-	7,255,838	7,255,838	
2	Jumlah Kumulatif Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Terampil Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan	960 orang 32 Angkatan	-	4,284,128	4,284,128	
3	Persentase Pelayanan Urusan Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Administrasi Umum, Perpustakaan, Perlengkapan dan Rumah Tangga, Termasuk Pembayaran Gaji Pegawai	100%	6,899,154	770,272	7,669,426	
4	Persentase Dukungan Peningkatan Kapasitas, Penyusunan Program & Anggaran, serta Monitoring dan Evaluasi	100%	-	2,506,430	2,506,430	
	Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta		11,189,911	13,223,488	24,413,399	
1	Jumlah Kumulatif Aparat Desa/Kelurahan yang Terampil Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan	960 orang	-	3,175,000	3,175,000	
2	Jumlah Kumulatif Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Terampil Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan	1080 orang 36 Angkatan	-	3,874,523	3,874,523	
3	Persentase Pelayanan Urusan Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Administrasi Umum, Perpustakaan, Perlengkapan dan Rumah Tangga, Termasuk Pembayaran Gaji Pegawai	100%	11,189,911	2,998,430	14,188,341	
4	Persentase Dukungan Peningkatan Kapasitas, Penyusunan Program & Anggaran, serta Monitoring dan Evaluasi	100%	-	3,175,535	3,175,535	
	Balai Pemerintahan Desa Lampung		4,640,020	17,628,932	22,268,952	
1	Jumlah Kumulatif Aparat Desa/Kelurahan yang Terampil Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1.800 orang (60 Angkatan)	-	4,758,000	4,758,000	
2	Jumlah Kumulatif Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Terampil Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan	900 orang (30 Angkatan)	-	2,200,000	2,200,000	
3	Persentase Pelayanan Urusan Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Administrasi Umum, Perpustakaan, Perlengkapan dan Rumah Tangga, Termasuk Pembayaran Gaji Pegawai	100%	4,640,020	9,675,318	14,315,338	
4	Persentase Dukungan Peningkatan Kapasitas, Penyusunan Program & Anggaran, serta Monitoring dan Evaluasi	100%	-	995,614	995,614	
1244	PENATAAN DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	-	90,884,271	90,884,271	
1	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibina Dalam Melaksanakan Penataan Wilayah Desa/ Kelurahan	34 Prov dan 20 Kab/Kota	-	6,412,730	6,412,730	

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK	RENCANA BELANJA 2016 (Rp X 1000)			KET
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
	2 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibina dalam Melaksanakan Penamaan, dan Kode Desa/ Kelurahan	34 Prov dan 20 Kab/Kota	-	5,668,550	5,668,550	
	3 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibina Dalam Penyusunan Produk Hukum Desa	34 Prov dan 20 Kab/Kota	-	4,880,421	4,880,421	
	4 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibina dalam Melaksanakan Penataan Kewenangan Desa/Kelurahan	34 Prov dan 20 Kab/Kota	-	5,260,890	5,260,890	
	5. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibina dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	34 Prov dan 20 Kab/Kota	-	61,626,450	61,626,450	
	6. Terlaksananya Pilot project Pelayanan Di luar Jam Kantor Desa	1000 Desa	-	6,800,000	6,800,000	
	7. Tersusunnya Permen NSPK SPM Desa	1 Permendagri	-	235,230	235,230	
1246	KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA DESA	Meningkatnya Fungsi Kelembagaan dan Kerjasama Desa	-	59,255,377	59,255,377	
	1 Jumlah provinsi dan kabupaten yang difasilitasi badan permusyawaratan desa dan musyawarah desa	33 Provinsi 416 Kabupaten	-	4,759,201	4,759,201	
	2 Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pengembangan kapasitas kelembagaan pendukung perangkat desa	34 Provinsi 514 Kabupaten/ Kota	-	5,606,641	5,606,641	
	3 Jumlah provinsi dan kabupaten yang di fasilitasi dalam bimbingan kemasyarakatan desa	33 Provinsi 416 Kabupaten	-	5,220,267	5,220,267	
	4 Jumlah posyandu yang menyediakan layanan dasar masyarakat target peningkatan kapasitas PKK	1.000 posyandu pada 34 provinsi	-	21,000,527	21,000,527	
	5 Jumlah pemerintah daerah yang diikat dalam kesepakatan peningkatan kerja sama antar pemerintahan desa	34 provinsi 516 kabupaten/kota	-	15,785,359	15,785,359	
	6 Jumlah Desa Penyelenggara Penerapan Model Perencanaan Pembangunan Partisipatif dengan Sistem Penyusunan RABDesa secara partisipatif	14,098 Desa	-	5,872,684	5,872,684	
	7 Jumlah provinsi dan kabupaten/kota, yang difasilitasi dalam pelaksanaan evaluasi kelembagaan kerjasama desa	33 Provinsi 416 Kab	-	505,349	505,349	
	8 Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang difasilitasi dalam peningkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	33 Provinsi 416 Kab	-	505,349	505,349	
1247	FASILITASI KEUANGAN DAN ASET PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Kapasitas Aparat dan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset desa yang Efektif,Transparan dan Akuntabel	-	36,167,882	36,167,882	
	1 Jumlah Provinsi dan kabupaten/Kota membina penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa sesuai aturan perundangan	33 Provinsi 514 Kab/Kota(renstra 74.093 Desa)	-	7,593,865	7,593,865	
	2 Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki sistem pengembangan sumber-sumber pendapatan desa	34 Prov dan 514 Kab	-	5,435,741	5,435,741	
	3 Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang dibina dalam penyelenggaraan pengelolaan aset desa	34 Prov dan 514 Kab	-	5,055,649	5,055,649	
	4 Jumlah provinsi dan kabupaten yang memiliki sistem Informasi Keuangan dan Aset Desa	34 Prov dan 514 Kab	-	7,082,627	7,082,627	
	5 Terlaksananya dukungan implementasi PP Sistem Keuangan Desa	Terlaksananya dukungan implementasi PP Sistem Keuangan Desa / 33 Provinsi	-	1,500,000	1,500,000	

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK	RENCANA BELANJA 2016 (Rp X 1000)			KET
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
	6 Terlaksananya Pilot project format birokrasi Pemdes (organisasi, PNS, Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan) untuk implementasi dana desa dan RABDesa dilaksanakan dengan pola detasering pendampingan		-	9,500,000	9,500,000	
1248	FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA	Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kader Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	-	597,463,121	597,463,121	
	1 Jumlah Dokumen Standar Kapasitas	6 Dokumen	-	55,263,121	55,263,121	
	2 Jumlah Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah I	22.910 Desa dan 2.329 Kelurahan	-	10,400,000	10,400,000	
	3 Jumlah Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah II	23.117 Desa dan 2.873 Kelurahan	-	10,200,000	10,200,000	
	4 Jumlah Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah III	15.121 Desa dan 2.366 Kelurahan	-	10,700,000	10,700,000	
	5 Jumlah Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah IV	12.945 Desa dan 804 Kelurahan	-	10,900,000	10,900,000	
	6 Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	168.252 Aparat Desa	-	500,000,000	500,000,000	
1249	EVALUASI PERKEMBANGAN DESA	Terlaksananya Evaluasi Tingkat Perkembangan dan Peningkatan Kapasitas Desa/Kelurahan	-	42,750,401	42,750,401	
	1 Jumlah Dokumen Standard dan Pedoman Evaluasi	4 Dokumen	-	20,000,617	20,000,617	
	2 Jumlah Desa yang Dievaluasi pada Wilayah I	10 Provinsi/120 Kabupaten/34 Kota 22.910 Desa dan 2.329 Kelurahan	-	5,158,140	5,158,140	
	3 Jumlah Desa yang Dievaluasi pada Wilayah II	6 Provinsi/85 Kabupaten/34 Kota 23.117 Desa dan 2.873 Kelurahan	-	4,432,847	4,432,847	
	4 Jumlah Desa yang Dievaluasi pada Wilayah III	8 Provinsi/84 Kabupaten/13 Kota 15.121 Desa dan 2.366 Kelurahan	-	4,955,953	4,955,953	
	5 Jumlah Desa yang Dievaluasi pada Wilayah IV	10 Provinsi/127 Kabupaten/17 Kota 12.945 Desa 804 Kelurahan	-	5,831,842	5,831,842	
	6 Jumlah Provinsi, Kab/Kota yang di Fasilitasi dalam Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa	33 Provinsi 50 Kab/Kota	-	2,371,002	2,371,002	
1250	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI	Dukungan Pelayanan Teknis dan Administratif Yang Berkualitas Di Lingkungan Ditjen Bina Pemdes Kemendagri	59,745,548	121,692,432	181,437,980	
	1 Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran yang Direncanakan	4 Dokumen	-	14,235,577	14,235,577	
	2 Jumlah Laporan Keuangan Dalam Memenuhi Kebutuhan Administrasi dan Keuangan Serta Laporan Keuangan yang Sesuai Dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	4 Laporan	-	7,000,000	7,000,000	
	3 Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Sekretariat Ditjen Bina Pemdes	100%	-	35,635,956	35,635,956	
	4 Pembangunan dan Rehab Gedung Bangunan Ditjen Bina Pemerintahan Desa	100%	-	10,844,280	10,844,280	
	5 Persentase Data Aset Barang Milik Negara (BMN) Sesuai Dengan Standar	100%	-	5,000,000	5,000,000	
	6 Persentase Pembinaan Kepegawaian	100%	-	4,060,825	4,060,825	
	7 Persentase penyelesaian peraturan perundang-undangan sesuai standar	100%	-	7,551,070	7,551,070	
	8 Jumlah laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan di pusat dan daerah sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT)	2 Laporan	-	7,184,617	7,184,617	
	9 Persentase Penyelesaian Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	-	5,143,505	5,143,505	
	10 Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Ditjen Bina Pemerintahan Desa	100%	-	17,036,602	17,036,602	

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK	RENCANA BELANJA 2016 (Rp X 1000)			KET
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
	11 Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langganan Daya dan Jasa) yang Tepat Waktu	100%	59,745,548	-	59,745,548	
	12 Mengembangkan Pusat Informasi Desa / Balai Rakyat		-	7,000,000	7,000,000	
	13 Konsolidasi Kementerian/Lembaga		-	1,000,000	1,000,000	

VII. DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK	RENCANA BELANJA 2016 (Rp X 1000)			KET
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
010.09.09	PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif	34,092,469	63,441,789	97,534,258	
	1 Jumlah Provinsi /Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu	30 Provinsi; 250 Kab/Kota				AP
	2 Jumlah Prov/kab/kota yang menetapkan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	30 Provinsi; 250 Kab/Kota				AP
	3 Persentase Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD	62%				AP
	4 Jumlah daerah yang menyerap (≥90%) Dak dalam APBD sesuai Juknis	90%				AP
	5 Jumlah Pemda yang Menerapkan Akuntansi Berbasis Akrual	22 Provinsi; 275 Kab/kota				AP
	6 Persentase Daerah yang Belanja APBD nya Berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan	15%				AP
1274	PEMBINAAN PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH	Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah	-	8,967,950	8,967,950	
	1 Jumlah Kebijakan/Regulasi/Pedoman di Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	2 PP, 7 Permendagri, 68 Kepmendagri		4,070,000	4,070,000	AP
	2 Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi / Kab/Kota yang tepat Waktu	30 Provinsi; 250 Kab/Kota		1,497,950	1,497,950	AP
	3 Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan	15% Daerah		1,000,000	1,000,000	AP
	4 Tersedianya dokumen Panduan penerapan e-budgeting (Provinsi Jawa Barat dan NTT)	1 Laporan; 2 Provinsi		800,000	800,000	QW
	5 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Anggaran Daerah	100%		1,000,000	1,000,000	KL
	6 Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah	100%		600,000	600,000	KL
1275	PEMBINAAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatkan pendapatan daerah		8,458,650	8,458,650	
	1 Jumlah Kebijakan/Regulasi/Pedoman di Bidang Pendapatan Daerah	1 Permendagri		1,200,000	1,200,000	AP
	2 Jumlah Daerah Yang Meningkatkan Pendapatan Daerah (termasuk daerah tertinggal)	34 Provinsi, 45 Daerah Tertinggal		2,600,000	500,000	AP
	3 Persentase penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD	62%		4,058,650	4,058,650	AP
	4 Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat Pendapatan Daerah	100%		600,000	600,000	KL

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK	RENCANA BELANJA 2016 (Rp X 1000)			KET
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
5313	PEMBINAAN PENGELOLAAN BUMD, BLUD DAN BMD	Meningkatkan kualitas pengelolaan BUMD, BLUD dan BMD		8,013,458	8,013,458	
	1 Jumlah Kebijakan/Regulasi/Pedoman di Bidang Pengelolaan BUMD, BLUD dan BMD	1 PP, 6 Permendagri		2,700,000	2,700,000	AP
	2 Persentase penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap rencana pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam APBD	62%		1,213,458	1,213,458	AP
	3 Jumlah SKPD/Unit kerja SKPD yang telah menerapkan PPK-BLUD	450 SKPD unit kerja SKPD		1,200,000	1,200,000	KL
	4 Jumlah Daerah yang terfasilitasi dalam rangka tertib pengelolaan BMD	34 Provinsi		2,300,000	2,300,000	KL
	5 Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat BUMD, BLUD dan BMD	100%		600,000	600,000	KL
1276	PEMBINAAN DAN FASILITASI DANA PERIMBANGAN DAN PINJAMAN DAERAH	Meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah		8,837,064	8,837,064	
	1 Jumlah Kebijakan/Regulasi/Pedoman di Bidang Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah	2 PP		1,350,000	1,350,000	AP
	2 Jumlah Pemerintah Provinsi yang memperoleh Fasilitas dalam Penggunaan dan Pelaporan Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah	100%		3,387,064	3,387,064	KL
	3 Jumlah daerah yang menyerap (≥90%) DAK dalam APBD sesuai dengan juknis	90%		1,350,000	1,350,000	AP
	4 Terlaksananya Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap dana transfer di tingkat Provinsi dan Kab/Kota	4 dokumen		450,000	450,000	AP
	5 Model Transparansi Pembinaan Keuangan Daerah untuk masukan revisi peraturan Peundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah	4 Provinsi (DKI, Jatim, Riau, dan Kaltim)		700,000	700,000	PL
	6 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah	100%		1,000,000	1,000,000	AP
	7 Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat Fasilitas Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah	100%		600,000	600,000	KL
1277	PEMBINAAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah		12,700,934	12,700,934	
	1 Jumlah Kebijakan/Regulasi/Pedoman di Bidang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	2 Permendagri, 34 Kepmendagri		2,100,934	2,100,934	AP
	2 Jumlah Prov/kab/Kota yang menetapkan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	30 Provinsi; 250 Kab/Kota		1,200,000	1,200,000	AP
	3 Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menggunakan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah	80%		1,100,000	1,100,000	AP
	4 Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual	22 Provinsi; 275 Kab/kota		3,700,000	3,700,000	AP
	5 Jumlah daerah yang mendapatkan opini WTP (Provinsi dan kabupaten/Kota)	21 Provinsi; 200 Kab/kota		3,000,000	3,000,000	AP
	6 Jumlah Data dan Informasi terkait pelaksanaan Anggaran Daerah	100%		1,000,000	1,000,000	KL

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK	RENCANA BELANJA 2016 (Rp X 1000)			KET
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
	7 Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	100%		600,000	600,000	KL
1278	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	Terselesainya pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah	34,092,469	16,463,733	50,556,202	
	1 Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran	100%		1,563,000	1,563,000	KL
	2 Persentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi, serta Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut LHP	100%		887,000	887,000	KL
	3 Persentase Penyelesaian Laporan Keuangan yang sesuai Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Asset sesuai SIMAK EMN	100%		2,500,000	2,500,000	KL
	4 Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Dukungan Teknis Ditjen Bina Keuangan Daerah	100%		7,602,985	7,602,985	KL
	5 Persentase Penyelesaian Rancangan Program Legislasi dan Bahan Kebijakan Ditjen Bina Keuangan Daerah	100%		2,536,000	2,536,000	KL
	6 Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langganan Daya dan Jasa) yang tepat waktu		34,092,469		34,092,475	KL
	7 Persentase Penyelesaian Dukungan Data Keuangan Daerah	100%		1,374,748	1,374,756	KL

VIII. DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK	RENCANA BELANJA 2016 (Rp X 1000)			KET
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
010.08.10	PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Kualitas Database Kependudukan Nasional Sebagai Dasar Penerbitan Dokumen Kependudukan, Pelayanan Publik dan Pembangunan Nasional serta Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada	51,794,789	1,497,932,793	1,549,727,582	
	1 Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk	34 Provinsi dan 514 Kab/Kota				
	2 Meningkatkan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan	25 K/L (Kumulatif)				
	3 Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan	514 Kab/Kota				
	4 Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan	9 Provinsi dan 260 Kab/Kota				
1267	PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SAK) TERPADU	Terbangunnya sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) untuk pelayanan KTP-el di daerah, serta tersedianya database yang akurat dan terpadu	-	1,014,401,766	1,014,401,766	
	1 Jumlah Kab/Kota dalam pengelolaan KTP-el berbasis NIK dengan perekaman sidik jari	514 Kab/Kota		6,500,000	6,500,000	KL
	2 Jumlah Kabupaten/kota yang database kependudukan yang tersambung (online) dengan provinsi dan nasional	508 Kab/Kota		301,000,000	301,000,000	AP
	3 Jumlah Kab/Kota yang telah terpenuhi jaringan komunikasi, serta sarana dan prasarana SIAK di Daerah maupun Data Center Kependudukan secara Online	514 Kab/Kota		13,550,000	13,550,000	KL
	4 Fasilitasi Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk di Daerah	34 provinsi dan 514 kab/Kota		693,351,766	693,351,766	KL
1268	PENGLOLAAN INFORMASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan fasilitas pengelolaan informasi kependudukan	-	36,800,000	36,800,000	
	1 Jumlah Pedoman pelaksanaan pengelolaan informasi kependudukan	2 Juknis/rancangan Peraturan		500,000	500,000	KL
	2 Jumlah Kab/Kota yang terpenuhi operasionalisasi SIAK dan database kependudukan berbasis nomor induk kependudukan (NIK) nasional secara online	508 Kab/Kota		18,350,000	18,350,000	AP
	3 Jumlah daerah yang terfasilitasi (Bintek, dampingan teknis dan sosialisasi) pelaksanaan Sistem informasi Administrasi kependudukan	514 Kab/Kota dan 34 Provinsi		11,450,000	11,450,000	AP
	4 Jumlah Laporan monitoring evaluasi pelaksanaan program, dan dokumentasi kebijakan informasi kependudukan	6 Laporan		4,650,000	4,650,000	KL
	6 Penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat	1 Laporan		350,000	350,000	KL
	7 Pilot project pelayanan mobile terpadu (imigrasi, perijinan hak cipta-paten, kependudukan dan catatan sipil)	1 Laporan		1,500,000	1,500,000	QW
1269	PEMBINAAN ADMINISTRASI PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan cakupan fasilitas pelaksanaan pencatatan sipil	-	12,583,533	12,583,533	
	1 Jumlah Kebijakan/Pedoman Pelaksanaan Pencatatan Sipil	1 pedoman/Juknis		400,000	400,000	KL
	2 Jumlah Daerah yang terfasilitasi (bintek, advokasi dan sosialisasi) kebijakan pelaksanaan pencatatan sipil	34 Provinsi		8,333,533	8,333,533	AP
	3 Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Program, dan Dokumentasi Kebijakan Pencatatan Sipil	3 Laporan		2,250,000	2,250,000	KL

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK	RENCANA BELANJA 2016 (Rp X 1000)			KET
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
	4 Prosentase Penyelesaian, Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Pada Direktorat	1 Laporan		350,000	350,000	KL
1270	5 Persentase Anak yang Memiliki Akta Kelahiran	77%		1,250,000	1,250,000	AP
	PEMBINAAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan cakupan fasilitas pelaksanaan pendaftaran penduduk	-	88,109,452	88,109,452	
	1 Jumlah Kebijakan/Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk	1 Rancangan Pedoman / Juknis		500,000	500,000	KL
	2 Jumlah Daerah yang terfasilitasi (bintek, advokasi dan sosialisasi) kebijakan pelaksanaan pendaftaran penduduk	34 Provinsi		84,959,452	84,959,452	KL
	3 Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Program, dan Dokumentasi Kebijakan Pendaftaran Penduduk	5 Laporan		2,300,000	2,300,000	
	4 Prosentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Pada Direktorat	1 Laporan		350,000	350,000	
1271	PEMBINAAN APARATUR KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan fasilitas pembinaan aparatur kependudukan dan pencatatan sipil	-	10,740,275	10,740,275	
	1 Jumlah Kebijakan/Pedoman/Juknis Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Ranc Pedoman/Juknis		379,438	379,438	KL
	2 Pelaksanaan dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi) Kebijakan Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 Laporan		8,061,297	8,061,297	KL
	3 Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Program, dan Dokumentasi Kebijakan Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 Laporan		1,949,540	1,949,540	KL
	4 Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Pada Direktorat	1 Laporan		350,000	350,000	KL
1272	PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan fasilitas pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	-	12,700,000	12,700,000	
	1 Jumlah kebijakan/Pedoman Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	1 Rancangan/ Pedoman		599,800	599,800	KL
	2 Pelaksanaan dan Pembinaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	2 Laporan		2,100,200	2,100,200	KL
	3 Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Program, dan Dokumentasi Kebijakan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	4 Laporan		2,400,000	2,400,000	KL
	4 Jumlah K/L yang dapat mengakses database kependudukan berbasis NIK Nasional dan atau digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen, informasi untuk pelayanan publik	25 K/L (komulatif)		5,400,000	5,400,000	AP
	5 Pengendalian dan Pengamanan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	2 Laporan		1,850,000	1,850,000	KL
	6 Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Pada Direktorat	1 Laporan		350,000	350,000	KL
1273	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dukungan pelayanan teknis dan administrasi yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	51,794,789	322,597,767	374,392,556	
	1 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	3 Jenis Dokumen		3,200,000	3,200,000	
	2 Dokumen/Pedoman/Juknis, Rancangan Peraturan Perundangan dan Surat Keputusan Lingkup Ditjen Dukung	2 Jenis Dokumen		1,526,000	1,526,000	

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK	RENCANA BELANJA 2016 (Rp X 1000)			KET
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
	3 Jumlah Layanan Informasi Kependudukan melalui Media Cetak dan Media Elektronik	3 Jenis Media, 2 Laporan		18,060,475	18,060,475	AP
	4 Jumlah Laporan penyelesaian hasil monev dan laporan keuangan dan asset, laporan kinerja, serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP	5 Laporan		1,750,000	1,750,000	
	5 Jumlah Dokumen keuangan tahunan, dan laporan pengelolaan keuangan/kinerja keuangan serta Sistem Akuntansi Instansi (SAI) lingkup Ditjen Dukung	3 Jenis Dokumen, 12 Bulan		2,650,000	2,650,000	
	6 Prosentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas lainnya	1 Laporan		3,300,000	3,300,000	
	7 Prosentase pengadaan sarpras sesuai kebutuhan	1 Laporan		160,138,058	160,138,058	
	8 Prosentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan) Perkantoran serta Langganan Daya dan Jasa yang tepat waktu	1 Laporan	51,794,789	131,648,234	183,443,023	
	9 Prosentase Kesesuaian Capaian Kinerja dengan Rencana Kerja Tahunan	1 Laporan		325,000	325,000	

IX. INSPEKTORAT JENDERAL

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK	PAGU 2016 (Rp X 1000)			KET
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
010.02.03	PROGRAM PENGAWASAN INTERNAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		35,890,267	33,970,442	69,860,709	
	1. NILAI AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI B (75) - Baik				
	2. NILAI AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH	PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH YANG BAIK B (75) - Baik				
	3. NILAI PENEKAKAN INTEGRITAS	PEMERINTAHAN YANG BERINTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH B (75) - Baik				
1225	PENGAWASAN FUNGSIONAL PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI INSPEKTORAT I		-	3,109,657	3,109,657	KL
	1. Nilai Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat I	Layanan Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat I yang optimal B (75) - Baik		2,743,664	2,743,664	
	2. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat I	Layanan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat I yang optimal 80%		365,993	365,993	
1226	PENGAWASAN FUNGSIONAL PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI INSPEKTORAT II		-	5,185,769	5,185,769	KL
	1. Nilai Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat II	Layanan Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat II yang optimal B (75) - Baik		4,738,710	4,738,710	
	2. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat II	Layanan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat II yang optimal 80%		447,059	447,059	
1227	PENGAWASAN FUNGSIONAL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH INSPEKTORAT III		-	5,290,794	5,290,794	KL
	1. Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Inspektorat III	Layanan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Inspektorat III yang optimal B (75) - Baik		5,290,794	5,290,794	
1228	PENGAWASAN FUNGSIONAL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH INSPEKTORAT IV		-	5,269,654	5,269,654	KL
	1. Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Inspektorat IV	Layanan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Inspektorat IV yang optimal B (75) - Baik		5,269,654	5,269,654	

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK	PAGU 2016 (Rp X 1000)			KET
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
1229	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA INSPEKTORAT JENDERAL		35,890,267	11,403,141	47,293,408	KL
	1. Persentase Terpenuhinya Belanja Operasional Inspektorat Jenderal	Dukungan Belanja Operasional Inspektorat Jenderal yang optimal 100%	35,890,267	-	35,890,267	
	2. Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Inspektorat Jenderal	Dukungan Perencanaan Inspektorat Jenderal yang optimal 100%	-	4,803,141	4,803,141	
	3. Persentase Penyelesaian Dokumen Analisis Dan Evaluasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal	Dukungan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang optimal 100%	-	2,000,000	2,000,000	
	4. Persentase Pengelolaan Dokumen Administrasi Keuangan Inspektorat Jenderal	Dukungan Administrasi Keuangan Inspektorat Jenderal yang optimal 100%	-	1,500,000	1,500,000	
	5. Persentase Pengelolaan Dokumen Administrasi Umum Inspektorat Jenderal	Dukungan Administrasi Umum Inspektorat Jenderal yang optimal 100%	-	3,100,000	3,100,000	
1230	PENEGAKAN INTEGRITAS, PEMERIKSAAN DAN PENGUSUTAN KHUSUS KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH		-	3,711,427	3,711,427	KL
	1. Nilai Penegakan Integritas	Layanan Penegakan Integritas Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang optimal B (75) - Baik	-	500,000	500,000	
	2. Persentase Pemeriksaan dan Pengusutan Khusus pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	Layanan Pemeriksaan dan Pengusutan Khusus Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang optimal 80%	-	3,211,427	3,211,427	

X. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK	PAGU 2016 (Rp X 1000)			KET
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
010.11.04	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI		28,095,866	27,808,965	55,904,831	
	1. Persentase hasil Kelitbitangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri	70%				
	2. Jumlah pemerintah daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah	34 Provinsi				
	3. Jumlah Kebijakan Inovasi Daerah	1 PP				
1280	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH		-	3,942,736	3,942,736	
	1. Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan hasil kelitbitangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian) Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan, dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan	Tersusunnya rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbitangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian) Pusat Pembangunan dan Keuangan Daerah 8 Rekomendasi	-	2,900,000	2,900,000	
	2. Jumlah hasil Forum Diskusi Aktual (FDA) Pembangunan dan Keuangan Daerah yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti	Tersedianya rekomendasi hasil Forum Diskusi Aktual (FDA) dalam rangka memecahkan permasalahan Pembangunan dan Keuangan Daerah 12 Rekomendasi FDA	-	540,000	540,000	
	3. Jumlah Pembinaan kelitbitangan (asistensi, koordinasi, fasilitasi, NSPK kelitbitangan, peningkatan kapasitas, monitoring dan evaluasi) pusat dan daerah Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah	Tercepaunya kegiatan pembinaan kelitbitangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kelitbitangan pusat dan daerah Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah 4 Laporan Pembinaan Kelitbitangan	-	502,736	502,736	
1281	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH, POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM		-	3,942,736	3,942,736	
	1. Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan hasil kelitbitangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian) Puslitbang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum yang diseminarkan, dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan	Tersusunnya rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbitangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian) Pusat Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum 8 Rekomendasi	-	2,900,000	2,900,000	
	2. Jumlah hasil Forum Diskusi Aktual (FDA) Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti	Tersedianya rekomendasi hasil Forum Diskusi Aktual (FDA) dalam rangka memecahkan permasalahan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum 12 Rekomendasi FDA	-	540,000	540,000	
	3. Jumlah Pembinaan kelitbitangan (asistensi, koordinasi, fasilitasi, NSPK kelitbitangan, peningkatan kapasitas, monitoring dan evaluasi) pusat dan daerah Puslitbang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum	Tercepaunya kegiatan pembinaan kelitbitangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kelitbitangan pusat dan daerah Bidang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum 4 Laporan Pembinaan Kelitbitangan	-	502,736	502,736	
1282	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		-	3,942,736	3,942,736	

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK	PAGU 2016 (Rp X 1000)			KET
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
	1. Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan hasil kelibangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perencanaan, dan pengoperasian) Puslitbang Administrasi Wilayah, Pemerintahan Desa dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diseminarkan, dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan	Tersusunnya rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelibangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perencanaan, dan pengoperasian) Pusat Administrasi Wilayah, Pemerintahan Desa dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8 Rekomendasi	-	2,900,000	2,900,000	
	2. Jumlah hasil Forum Diskusi Aktual (FDA) Administrasi Wilayah, Pemerintahan Desa dan Kependudukan yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti	Tersedianya rekomendasi hasil Forum Diskusi Aktual (FDA) dalam rangka memecahkan permasalahan Administrasi Wilayah, Pemerintahan Desa dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12 Rekomendasi FDA	-	540,000	540,000	
	3. Jumlah Pembinaan kelibangan (asistensi, koordinasi, fasilitasi, NSPK kelibangan, peningkatan kapasitas, monitoring dan evaluasi) pusat dan daerah Puslitbang Administrasi Wilayah, Pemerintahan Desa dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tercaapainya kegiatan pembinaan kelibangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kelibangan pusat dan daerah Bidang Administrasi Wilayah, Pemerintahan Desa dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4 Laporan Pembinaan Kelibangan	-	502,736	502,736	
1283	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH		-	4,263,164	4,263,164	
	1. Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan hasil Kelibangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perencanaan, dan pengoperasian) Puslitbang Inovasi Daerah dan Aparatur yang diseminarkan, dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan	Tersusunnya rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelibangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perencanaan, dan pengoperasian) Puslitbang Inovasi Daerah 8 Rekomendasi	-	2,000,000	2,000,000	
	2. Jumlah daerah (provinsi/kab/kota) yang memperoleh pembinaan pelaksanaan inovasi daerah	Terfasilitasinya pembinaan terhadap daerah (provinsi/kab/kota) yang melaksanakan inovasi daerah 34 Provinsi	-	450,000	450,000	
	3. Jumlah Kebijakan Inovasi Daerah	Tersusunnya kebijakan inovasi daerah 1 Peraturan	-	1,000,000	1,000,000	
	4. Jumlah Pembinaan kelibangan (asistensi, koordinasi, fasilitasi, NSPK kelibangan, peningkatan kapasitas, monitoring dan evaluasi) pusat dan daerah Puslitbang Inovasi Daerah	Tercaapainya kegiatan pembinaan kelibangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kelibangan pusat dan daerah Bidang Inovasi Daerah dan Aparatur 4 Laporan Pembinaan Kelibangan	-	813,164	813,164	
1284	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI		28,095,866	11,717,593	39,813,459	
	1. Prosentase Penyelesaian dokumen Perencanaan dan Anggaran, Pengelolaan Data dan Evaluasi Kinerja serta Kerjasama Kelibangan, Hukum dan Perundang-undangan	Tersusunnya Dokumen perencanaan dan anggaran, dokumen pengelolaan data dan evaluasi kinerja serta Kerjasama kelibangan, hukum dan perundang-undangan 100% 3 Dokumen, 1 Peraturan, 8 Laporan	-	3,575,000	3,575,000	
	2. Prosentase penyelesaian Administrasi Ketatausahaan Pimpinan, Kerumahtanggaan dan Perlengkapan, serta Pengelolaan Perpustakaan, Informasi dan Dokumentasi	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan, Kerumahtanggaan dan Perlengkapan, serta Pengelolaan Perpustakaan, Informasi dan Dokumentasi 100% 11 Laporan	-	2,925,000	2,925,000	

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK	PAGU 2016 (Rp X 1000)			KET
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
	3. Prosentase penyelesaian Administrasi Verifikasi, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu	Terselesaikannya administrasi verifikasi, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu 100% 8 Laporan	-	1,858,000	1,858,000	
	4. Prosentase penyelesaian Pembinaan Jabatan Fungsional, Kepegawaian dan Sistem Prosedur	Terselesaikannya pembinaan jabatan fungsional, administrasi kepegawaian dan akreditasi, sistem dan prosedur serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara 100% 17 laporan	-	1,924,000	1,924,000	
	5. Prosentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	Terlaksananya pelayanan dukungan operasional kerja yang tepat waktu (12 bulan) 100% 12 bulan layanan	28,095,866	-	28,095,866	
	6. Prosentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tupoksi Badan Litbang 100 % 110 Unit	-	1,435,593	1,435,593	

XI. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK	PAGU 2016 (Rp X 1000)			KET
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
010.12.05	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		91,536,752	131,866,582	223,403,334	
	1. Peningkatan Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda Melalui Rasio Hari Pengembangan Kapasitas SDM Terhadap Hari Kerja	40%				
	2. Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pengembangan SDM Aparatur	3				
1285	STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	Meningkatnya kualitas pengembangan SDM Bidang Standarisasi dan Sertifikasi	-	12,440,822	12,440,822	
	1. Penyusunan Kebijakan Teknis, dan Rencana Pusat Standarisasi dan Sertifikasi Pemerintahan Dalam Negeri	Tersusunnya Kebijakan Teknis, dan Rencana Pusat Standarisasi dan Sertifikasi Pemerintahan Dalam Negeri 9 Naskah	-	1,050,000	1,050,000	K/L
	2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga dan Lembaga Kependidikan, serta Teknologi Pembelajaran	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga dan Lembaga Kependidikan, serta Teknologi Pembelajaran 44 Angkatan	-	4,265,822	4,265,822	K/L
	3. Penilaian kompetensi sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri	Tersusunnya Pedoman Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintahan Dalam Negeri 5 Dokumen	-	750,000	750,000	
	4. Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan SDM Pemerintahan Dalam Negeri	Terlaksananya Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Pengembangan SDM Pemerintahan Dalam Negeri 3 Laporan	-	225,000	225,000	K/L
	5. Manajemen Aset, rumah Tangga, Administrasi, dan Umum	Terlaksananya Manajemen Aset, rumah Tangga, Administrasi, dan Umum 1 laporan	-	150,000	150,000	
	6. Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi serta Kerjasama Diklat Pemerintahan Dalam Negeri	Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi serta Kerjasama Diklat Pemerintahan Dalam Negeri 3 dokumen	-	3,000,000	3,000,000	PL
	7. Tersusunnya Desain Model Pembinaan Kepegawaian Pusat dan Daerah dengan Standarisasi Pembinaan, Standar Kompetensi Pimpinan SKPD, Personil, PHS dll. Dilaksanakan di Lampung, DIY, Jateng oleh KemenPAN dan RB dan Kemendagri	Tersusunnya Desain Model Pembinaan Kepegawaian Pusat dan Daerah dengan Standarisasi Pembinaan, Standar Kompetensi Pimpinan SKPD, Personil, PHS dll. Dilaksanakan di Lampung, DIY, Jateng oleh KemenPAN dan RB dan Kemendagri 3 dokumen	-	3,000,000	3,000,000	AP
1287	PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	Meningkatnya kualitas pengembangan SDM Bidang Kompetensi Kemendagri dan Pemerintah Daerah	-	13,619,589	13,619,589	
	1. Penyusunan Kebijakan Teknis, dan Rencana Pusat Pengembangan Kompetensi Kemendagri dan Pemda	Tersusunnya Kebijakan Teknis, dan Rencana Pusat Pengembangan Kompetensi Kemendagri dan Pemda 9 Naskah	-	1,050,000	1,050,000	
	2. Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Kemendagri dan Pemda	Terlaksananya Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Kemendagri dan Pemda 3 Laporan	-	225,000	225,000	
	3. Manajemen Aset, rumah Tangga, Administrasi, dan Umum	Terlaksananya Manajemen Aset, rumah Tangga, Administrasi, dan Umum 1 laporan	-	150,000	150,000	

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK	PAGU 2016 (Rp X 1000)			KET
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
	4 Pelaksanaan Diklat Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah	Terlaksananya Diklat Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah 67 angkatan	-	5,674,646	5,674,646	B
	5 Pelaksanaan Diklat Manajemen Kepemimpinan dan Penda	Terlaksananya Diklat Manajemen Kepemimpinan dan Penda 53 Angkatan	-	6,519,943	6,519,943	N
1288	PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPAMONGPRAJAJAN DAN MANAJEMEN KEPEMIMPINAN	Meningkatnya kualitas pengembangan SDM Bidang Kompetensi Kepamongprajajan dan Manajemen Kepemimpinan	-	22,084,404	22,084,404	
	1 Penyusunan Kebijakan Teknis, dan Rencana Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajajan dan Manajemen Kepemimpinan	Tersusunnya Kebijakan Teknis, dan Rencana Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajajan dan Manajemen Kepemimpinan 9 Naskah	-	1,050,000	1,050,000	
	2 Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Kepamongprajajan, Kepemimpinan dan Prajabatan serta Administrasi dan Manajemen	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Kepamongprajajan, Kepemimpinan dan Prajabatan serta Administrasi dan Manajemen 42 Angkatan	-	17,709,404	17,709,404	
	3 Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Kepamongprajajan dan Manajemen Kepemimpinan	Terlaksananya Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Kepamongprajajan dan Manajemen Kepemimpinan 5 Laporan	-	2,725,000	2,725,000	
	4 Manajemen Aset, rumah Tangga, Administrasi, dan Umum	Terlaksananya Manajemen Aset, rumah Tangga, Administrasi, dan Umum 1 laporan	-	150,000	150,000	
	5 Pelaksanaan Diklat Manajemen Kepemimpinan dan Penda	Terlaksananya Diklat Manajemen Kepemimpinan dan Penda 5 Angkatan	-	450,000	450,000	N
1289	PENGEMBANGAN KOMPETENSI FUNGSIONAL DAN TEKNIS	Meningkatnya kualitas pengembangan SDM Bidang Kompetensi Fungsional dan Teknis	-	8,340,801	8,340,801	
	1 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis 7 Naskah	-	850,000	850,000	
	2 Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pengembangan Kompetensi Jafung Kemendagri, Bidang Administrasi Jafung dan Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional K/L	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pengembangan Kompetensi Jafung Kemendagri, Bidang Administrasi Jafung dan Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional K/L 34 Angkatan	-	4,290,801	4,290,801	
	3 Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis	Terlaksananya Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis 31 Laporan	-	3,050,000	3,050,000	
	4 Manajemen Aset, rumah Tangga, Administrasi, dan Umum	Terlaksananya Manajemen Aset, rumah Tangga, Administrasi, dan Umum 1 laporan	-	150,000	150,000	
1290	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL		48,915,722	58,158,798	107,074,520	
	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional Bandung		11,602,254	13,410,433	25,012,687	

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK	PAGU 2016 (Rp X 1000)			KET
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
	1 Pengkoordinasian dan Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Pemerintahan Dalam Negeri	Adanya sinergitas penyelenggaraan Diklat Pemerintahan Dalam Negeri yang berbasis kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan kebutuhan institusi 4 Laporan	-	717,730	717,730	K/L
	2 Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Adanya PNS yang berkompeten melalui Diklat Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan bidang tugasnya 41 angkatan	-	9,299,972	9,299,972	K/L
	3 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	Adanya dukungan manajemen dan teknis lainnya yang menjamin terwujudnya sistem diklat yang berbasis kompetensi 100%	11,602,254	3,392,731	14,994,985	K/L
	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional Yogyakarta		17,168,926	16,159,210	33,328,136	
	1 Pengkoordinasian dan Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Pemerintahan Dalam Negeri	Adanya sinergitas penyelenggaraan Diklat Pemerintahan Dalam Negeri yang berbasis kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan kebutuhan institusi 3 Laporan	-	913,481	913,481	K/L
	2 Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Penda	Adanya PNS yang berkompeten melalui Diklat Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan bidang tugasnya 52 Angkatan	-	11,812,576	11,812,576	K/L
	3 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	Adanya dukungan manajemen dan teknis lainnya yang menjamin terwujudnya sistem diklat yang berbasis kompetensi 100%	17,168,926	3,433,153	20,602,079	K/L
	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional Bukittinggi		10,502,906	16,146,308	26,649,214	
	1 Pengkoordinasian dan Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Kemendagri dan Penda	Adanya sinergitas penyelenggaraan Diklat Pemerintahan Dalam Negeri yang berbasis kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan kebutuhan institusi 4 Laporan	-	1,030,817	1,030,817	K/L
	2 Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Adanya PNS yang berkompeten melalui Diklat Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan bidang tugasnya 39 Angkatan	-	11,537,277	11,537,277	K/L
	3 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	Adanya dukungan manajemen dan teknis lainnya yang menjamin terwujudnya sistem diklat yang berbasis kompetensi 100%	10,502,906	3,578,214	14,081,120	K/L
	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional Makassar		9,641,636	12,442,847	22,084,483	
	1 Pengkoordinasian dan Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Kemendagri dan Penda	Adanya sinergitas penyelenggaraan Diklat Pemerintahan Dalam Negeri yang berbasis kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan kebutuhan institusi 3 Laporan	-	639,199	639,199	
	2 Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Adanya PNS yang berkompeten melalui Diklat Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan bidang tugasnya 36 Angkatan	-	8,267,051	8,267,051	

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK	PAGU 2016 (Rp X 1000)			KET
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
	3 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	Adanya dukungan manajemen dan teknis lainnya yang menjamin terwujudnya sistem diklat yang berbasis kompetensi 100%	9,641,636	3,536,597	13,178,233	
1291	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA BADANPENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Terlaksananya reformasi diklat aparatur di lingkungan Kemendagri dan Penda	42,621,030	17,222,168	59,843,198	
	1 Manajemen Aset, rumah Tangga, Administrasi, dan Umum	Terlaksananya pengelolaan aset, rumah tangga, administrasi umum 100%	12,506,647	9,817,421	22,324,068	K/L
	2 Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan 100%	-	3,854,747	3,854,747	K/L
	3 Penyusunan Dokumen Keuangan	Tersusunnya pengelolaan anggaran dan laporan keuangan 100%	30,114,383	1,750,000	31,864,383	K/L
	4 Manajemen Perundang-undangan dan Kerjasama	Terlaksananya manajemen perundang-undangan dan Kerjasama 100%	-	1,800,000	1,800,000	K/L

XII. INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KOMPONEN INPUT	OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK/SASARAN KOMPONEN	PAGU 2016 (Rp X 1000)			KET
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
010.01.12	PENDIDIKAN KEPAMONGPRAJAJAN	Meningkatnya kualitas pendidikan kepomongprajaan dan meningkatnya kepuasan Stakeholder terhadap Etos Kerja alumni IPDN, serta meningkatnya hasil penelitian dan pengabdian masyarakat	492,409,466	142,363,791	634,773,257	
	1 Program Studi yang Terakreditasi	B				
	2 Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental	60% (D-IV dan S1), 17% (S-2), 12% (S-3), 10% (Profesi)				
	3 Persentase tingkat kepuasan Stakeholder terhadap Etos Kerja	70% baik				
	4 Jumlah hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dipublikasikan dalam jurnal nasional/internasional yang terakreditasi	13 hasil penelitian, 3 hasil pengabdian masyarakat				
1292	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI, AKADEMIK, PERENCANAAN DAN KERJASAMA PENDIDIKAN KEPAMONGPRAJAJAN	Pelayanan Administrasi Akademik yang berkualitas, Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan Pelatihan serta Administrasi Kerjasama	-	49,397,142	49,397,142	KL
	1 Peningkatan rata-rata nilai IPK (pengajaran, pelatihan) Program Vokasi, Akademik dan Profesi Kepomongprajaan	0,03(D-IV), 0,04 (S-1), 0,15 (S-2), 0,03 (S-3), 0,03 (Profesi)	-	31,592,502	31,592,502	KL
	2 Persentase Pemanfaatan Media Informasi secara Elektronik yang	80%	-	1,350,000	1,350,000	KL
	3 Peningkatan Mutu pelayanan dan Pengembangan Pendidikan serta kualitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik	Persiapan Akreditasi Jurnal, 4 Rekomendasi Senat Institut (pertahun), 30 Tenaga Pendidik.	-	2,727,000	2,727,000	KL
	4 Jumlah Hasil Kajian dan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang terpublikasi pada jurnal kepomongprajaan	20 Penelitian, 20 Desa Binaan	-	6,298,273	6,298,273	KL
	5 Konsistensi Perencanaan dan Implementasi Penganggaran	100%	-	1,961,043	1,961,043	KL
	6 Grand desain penataan IPDN Kampus Pusat dan IPDN Kampus Daerah	Tersedianya Dokumen Grand Design IPDN	-	5,000,000	5,000,000	KL
	7 Jumlah kerjasama dengan K/L, Pemdada dan PTN/PTS dalam negeri	1 K/L; 5 Pemdada; 2 PTN/PTS	-	100,439	100,439	
	8 Jumlah kerjasama dengan Universitas Luar Negeri	2 kerjasama LN	-	367,885	367,885	KL
1293	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPRAJAJAN DAN KEMAHASISWAAN	Pelayanan administrasi keprajajaan dan kemahasiswaan tepat waktu	-	31,209,615	31,209,615	KL
	1 Persentase penurunan pelanggaran kedisiplinan praja pada IPDN	25% (dari 55 pelanggaran berat)	-	27,356,630	27,356,630	KL
	2 Peningkatan jumlah Prestasi Ekstrakurikuler Praja pada tingkat Nasional	6 penghargaan	-	3,452,985	3,452,985	KL
	3 Jumlah provinsi yang memiliki database lengkap alumni APDN/SIPDN/IPDN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional	13 Provinsi	-	400,000	400,000	KL
1294	PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN PENDIDIKAN KEPAMONGPRAJAJAN	Dukungan pelayanan administrasi dan teknis yang berkualitas	312,687,652	9,065,721	321,753,373	KL
	1 Jumlah tenaga kependidikan yang diikutsertakan dalam dilakukannya jabatan fungsional khusus (JFK), dan jumlah dosen tersertifikasi	20 Tenaga Kependidikan dan 150 Dosen Tersertifikasi (K)	-	446,600	446,600	KL
	2 Persentase penyelesaian administrasi umum dan keuangan yang tepat waktu	100%	312,687,652	8,319,121	321,006,773	KL
	3 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar mutu pendidikan	100%	-	300,000	300,000	KL

KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/KOMPONEN INPUT	OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK/SASARAN KOMPONEN	PAGU 2016 (Rp X 1000)			KET
			OPERASIONAL (01 & 02)	NON OPERASIONAL	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
1295	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPAMONGPRAJAJAN DI DAERAH	Terselenggaranya Pendidikan Kepomongprajaan IPDN Kampus di Daerah (Kampus Sulawesi Utara, Kampus Sulawesi Selatan, Kampus Riau, Kampus Sumatera Barat, Kampus Kalimantan Barat, Kampus Nusa Tenggara Barat, Kampus Papua)	179,721,814	52,691,313	232,413,127	KL
	1 Peningkatan rata-rata nilai pendidikan (pengajaran, pelatihan, pengesahan) program diploma	0,04 (dari IPK Th sebelumnya)	-	6,463,689	6,463,689	KL
	2 Jumlah hasil kajian penelitian dan pengabdian masyarakat untuk pengembangan akademik	14 Penelitian, 28 Desa	-	1,016,395	1,016,395	KL
	3 Persentase penurunan pelanggaran kedisiplinan praja pada IPDN	25% (dari 25 pelanggaran berat)	-	1,279,487	1,279,487	KL
	4 Peningkatan jumlah Prestasi Praja pada tingkat lokal (daerah)	14 penghargaan	-	785,410	785,410	KL
	5 Persentase penyelesaian dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya IPDN Kampus Daerah secara tepat waktu	100%	179,721,814	3,146,332	182,868,146	KL
	6 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar mutu pendidikan	100%	-	40,000,000	40,000,000	

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO